

2023

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN NAGEKEO



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NAGEKEO**

2023

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
KABUPATEN NAGEKEO**

<https://nagakeo.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN NAGEKEO 2022

ISBN	:
Nomor Publikasi	: 53180.2320
Katalog	: 4102004.5318
Ukuran Buku	: 28 x 21,5 cm
Jumlah Halaman	: xvi + 98 halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo
Gambar Kulit	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Untuk memenuhi kebutuhan data statistik, khususnya data publikasi sosial, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo kembali menerbitkan publikasi yang berjudul **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nagekeo 2023** yang merupakan kelanjutan publikasi edisi sebelumnya.

Publikasi ini menyajikan berbagai data dasar yang mencakup enam bidang yakni Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf Pola Konsumsi serta Perumahan dan Lingkungan. Data yang dimuat dalam publikasi bersumber dari Sensus dan Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (seperti data Susenas dan Sensus Penduduk) serta data dari instansi terkait.

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagekeo secara umum berdasarkan penilaian atas enam bidang tersebut.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya sempurna, maka segala kritik dan saran dari berbagai pihak kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu sampai terbitnya publikasi ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan dengan harapan semoga kerja sama yang serupa dapat ditingkatkan terus pada masa yang akan datang.

Mbay, Desember 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Nagekeo

Angela Regina Maria, S.ST, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xi
Konsep dan Definisi	xiii
Pendahuluan	1
I. Kependudukan	7
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	10
Kepadatan Penduduk	12
Karakteristik Penduduk	13
Fertilitas dan Keluarga Berencana	21
II. Kesehatan dan Gizi	25
Morbiditas	28
Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	29
Penolong Persalinan	30
III. Pendidikan	33
Angka Melek Huruf	36
Partisipasi Sekolah	37
Pendidikan yang Ditamatkan	41
IV. Ketenagakerjaan	43
TPAK dan Kesempatan Kerja	46
Sektor Ketenagakerjaan	49
Status Pekerjaan	50
V. Kemiskinan dan Pola Pengeluaran	55
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	60
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	62
Pola Pengeluaran	63
VI. Perumahan dan Lingkungan	69
Kondisi Kualitas Rumah Tinggal	72
Sumber Air Minum	73
Kebersihan Lingkungan	75
Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	78
VII. Indeks Pembangunan Manusia	81
Perkembangan IPM Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023	84
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat	87
Dimensi pengetahuan	89
Dimensi Standar Hidup Layak	92
Daftar Pustaka	95

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
I	<i>Tabel Kependudukan</i>	
1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nagekeo, 2020-2023	11
1.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nagekeo, 2021	12
1.3	Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Nagekeo, 2019-2023	14
1.4	Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) di Kabupaten Nagekeo Menurut Jenis Kelamin, 2019-2023	16
1.5	Rasio Beban Ketergantungan Di Kabupaten Nagekeo, 2018-2022	17
1.6	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Nagekeo, 2019-2023	18
1.7	Rasio Anak-Ibu (<i>Child-Women Ratio</i>) Kabupaten Nagekeo, 2020-2021	22
1.8	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Nagekeo, 2020-2022	23
II	<i>Tabel Kesehatan dan Gizi</i>	
2.1	Persentase Penduduk dengan Lama Hari Sakit di Kabupaten Nagekeo, 2021-2023	29
2.2	Persentase Penduduk Kabupaten Nagekeo Yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat, 2020 dan 2023	30
III	<i>Tabel Pendidikan</i>	
3.1	Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten Nagekeo Menurut Jenis Kelamin, 2023	36
3.2	Persentase Penduduk yang Sedang Bersekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2023	37
3.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan, 2023	41

IV	<i>Tabel Ketenagakerjaan</i>	
4.1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2022	47
4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nagekeo Menurut Jenis Kelamin, 2022	48
4.3	Persentase Penduduk Kabupaten Nagekeo Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2020	50
4.4	Komposisi Penduduk Kabupaten Nagekeo yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2021	52
4.5	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Nagekeo Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, 2020	53
V	<i>Tabel Kemiskinan</i>	
5.1.	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Nagekeo 2018-2022	62
5.2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kabupaten Nagekeo, 2018-2022	63
5.3.	Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Nagekeo (Persentase), 2016-2020	67
VI	<i>Tabel Perumahan dan Lingkungan</i>	
6.1	Indikator Kondisi Rumah di Kabupaten Nagekeo, 2018-2020 (persen)	72
6.2	Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2020-2022	76
6.3	Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2020-2022	77
VII	<i>Tabel Indeks Pembangunan Manusia</i>	
7.1	Indeks Pembangunan Manusia Sedaratan Flores, 2018-2023	85

7.2	Hasil Perhitungan Reduksi <i>Shortfall</i> IPM Kabupaten Nagekeo	87
7.3	Umur Harapan Hidup Sedaratan Flores, 2018-2023	88
7.4	Angka Harapan Lama Sekolah Sedaratan Flores, 2018-2023	90
7.5	Rata-rata Lama Sekolah Sedaratan Flores, 2018-2023	91
7.6	Rata-rata Pengeluaran Riil Per Kapita Sedaratan Flores, 2018-2023	93

<https://nagekeokab.bps.go.id>

Daftar Gambar

No Gambar	Judul	Halaman
1.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nagekeo, 2022	21
2.1	Persentase Jumlah Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Terganggunya Aktivitas di Kabupaten Nagekeo, 2023	28
2.2	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan Terakhir, 2023	31
3.1	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagekeo, 2023	39
3.2	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagekeo, 2023	40
3.3	Persentase Penduduk Nagekeo Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2023	42
4.1	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020	49
5.1	Persentase Penduduk Nagekeo Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan, 2022	64
5.2	Persentase Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran Dan Jenis Pengeluaran Di Kabupaten Nagekeo, 2022	65
5.3	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Nagekeo, 2018-2022	66
5.4	Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Nagekeo, 2018-2022	66
6.1	Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo Menurut Sumber Air Minum, 2022	74
6.2	Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut Jenis Kloset yang Digunakan, 2022	78

6.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Penggunaan Teknologi Informasi, 2022	79
7.1	Perkembangan IPM Kabupaten Nagekeo, 2018-2023	85

<https://nagekeokab.bps.go.id>

Konsep dan Definisi

<i>Penduduk</i>	:	Semua orang yang tinggal di suatu wilayah administrasi tertentu selama 6 bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap.
<i>Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk</i>	:	Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.
<i>Kepadatan Penduduk</i>	:	Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer per segi.
<i>Rasio Anak Wanita</i>	:	Rata-rata banyaknya anak di bawah usia 5 tahun per 1000 wanita usia subur 15-49 tahun.
<i>Rasio Jenis Kelamin</i>	:	Rasio antara banyaknya laki-laki dengan banyaknya wanita dikalikan seratus.
<i>Metode Kontrasepsi</i>	:	Cara/alat pencegah kehamilan.
<i>Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)</i>	:	Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.
<i>Status Gizi</i>	:	Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari tinggi/berat badan menurut umur. Kategorisasi status gizi ini dibuat berdasarkan <i>Standar Harvard</i> .

<i>Penduduk Usia Kerja</i>	:	Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
<i>Angkatan Kerja</i>	:	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
<i>Bekerja</i>	:	Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit 1 jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</i>	:	Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
<i>Angka Beban Tanggungan</i>	:	Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15-64 tahun) dikalikan seratus.
<i>Angka Buta Huruf</i>	:	Ukuran persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis.

SINGKATAN DAN AKRONIM

- 1) AKB : Angka Kematian Bayi
- 2) AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
- 3) KB : Keluarga Berencana
- 4) SP : Sensus Penduduk
- 5) SUPAS : Survei Penduduk Antar Sensus
- 6) SUSENAS : Survei Sosial Ekonomi Nasional
- 7) TFR : *Total Fertility Rate*
- 8) TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- 9) Podes : Potensi Desa
- 10) SD : Sekolah Dasar
- 11) SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
- 12) SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
- 13) SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
- 14) RLS/MYS : Rata-rata Lama Sekolah/Mean Year School
- 15) AMH : Angka Melek Huruf

KETERANGAN NOTASI

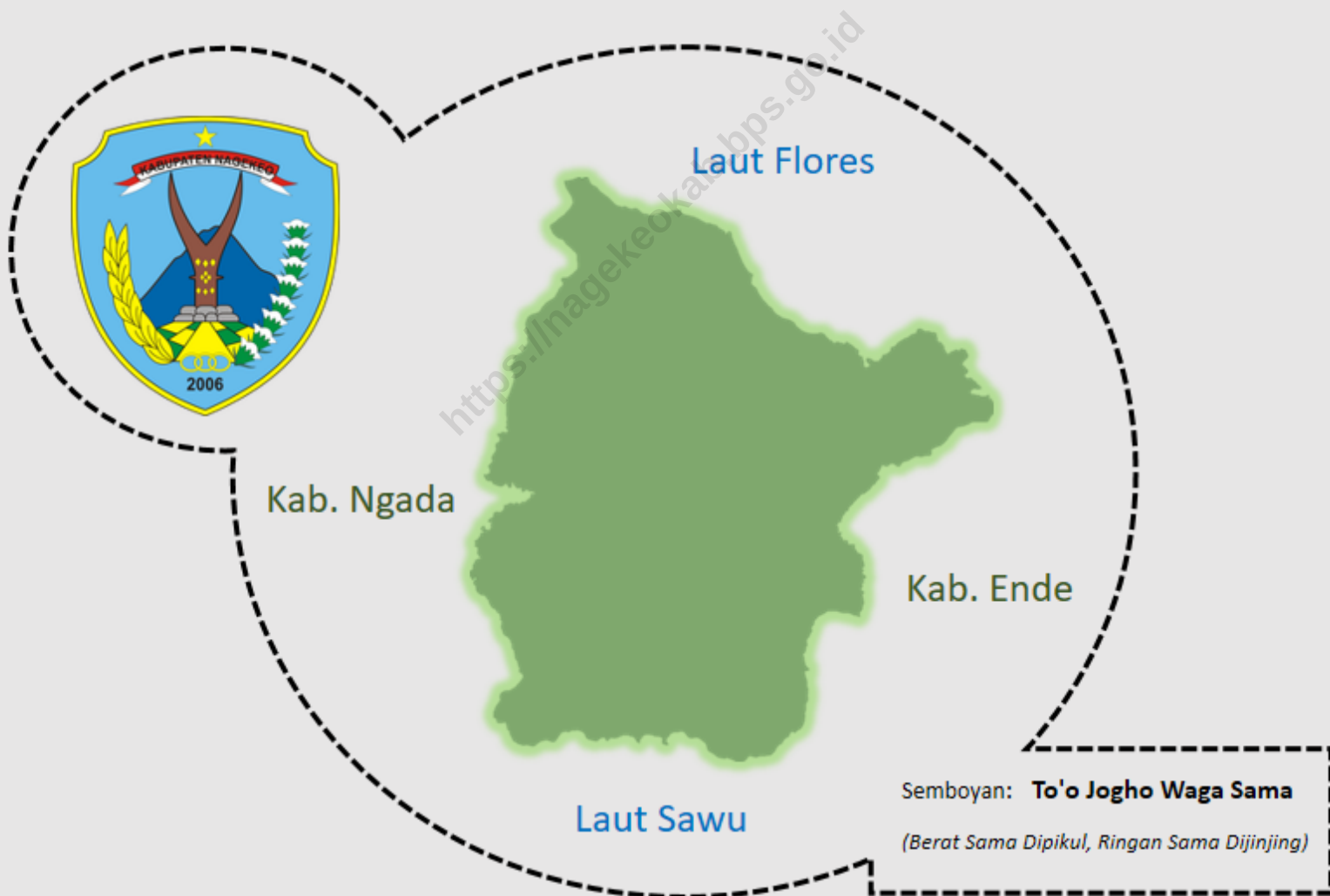
- Menunjukkan nol atau dapat diabaikan
 - Diantara dua angka dalam tabel menunjukkan desimal
- Data tidak tersedia
- *) Angka perbaikan

Pendahuluan

Dimanakah Kabupaten Nagekeo?

Kabupaten Nagekeo adalah salah satu kabupaten di **Provinsi Nusa Tenggara Timur**. Tepatnya, terletak di **Pulau Flores**

Kabupaten Nagekeo terbentuk sejak tahun 2006, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada.



Kabupaten Nagekeo memiliki batas:

(Utara) Laut Flores; **(Selatan)** Laut Sawu; **(Barat)** Kab. Ngada; **(Timur)** Kab. Ende

PENDAHULUAN

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 ini merupakan terbitan tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagekeo yang menyajikan beragam data statistik sosial yang telah diolah menjadi suatu kumpulan indikator. Data statistik yang disajikan dipilih sedemikian rupa sehingga secara langsung memberikan gambaran mengenai taraf, pemerataan dan perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Nagekeo. Pada bagian ini disajikan secara singkat latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika isi terbitan ini.

Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah dapat tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tingkat atau standar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui peningkatan pelayanan masyarakat yang mampu menyentuh semua lapisan sosial ekonomi masyarakat, dan mencakup pula penyediaan pangan yang baik, sandang dan papan atau perumahan bagi seluruh rakyat. Sementara itu, dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, pembangunan ekonomi dapat dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan rakyat juga semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan manajemen wilayah. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang memungkinkan suatu daerah memiliki kemampuan ekonomi untuk mendukung kegiatan lainnya, sedangkan sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan bagaimana kesejahteraan tersebut ditingkatkan. Sementara itu, manajemen wilayah lebih mengacu pada sistem pengaturan dan peraturan yang dikembangkan dalam wilayah tersebut. Hal ini bukan hanya yang dikembangkan oleh birokrasi pemerintahan, tetapi juga yang dikembangkan oleh pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri. Faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah faktor budaya. Keanekaragaman budaya bukan hanya sebagai kekayaan wilayah yang berpotensi di sektor pariwisata, tetapi tidak jarang juga menjadi faktor penghambat maupun pendukung dalam proses pembangunan. Dampak kebiasaan masyarakat

dapat bernilai positif bagi peningkatan kesejahteraan, tetapi juga dapat bernilai negatif dalam upaya peningkatan kesejahteraan (Ulah Tri Wibowo dan Tukiran 2003).

Kesejahteraan pada dasarnya tidak hanya terdiri dari satu dimensi atau berdimensi tunggal, melainkan multidimensi. Dengan kata lain, kesejahteraan terdiri dari beberapa komponen atau indikator yang menyusunnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain kesehatan, pendidikan, dan kualitas tempat tinggal. Indikator kesehatan diukur menggunakan variabel keluhan kesehatan dan lama sakit. Keluhan kesehatan sebagai indikasi adanya tingkat kesakitan/morbiditas, sedangkan lama sakit sebagai faktor lama gangguan yang dapat berpengaruh pada produktivitasnya. Kemudian, indikator pendidikan diukur dengan variabel melek huruf dan pendidikan yang ditamatkan. Diasumsikan kedua variabel tersebut dapat menggambarkan kemampuan sumber daya manusia dalam menemukan dan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Indikator ekonomi didekati dengan variabel pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, sedangkan kualitas tempat tinggal dapat menggambarkan tingkat hunian dan kesejahteraan masyarakat (Wibowo dan Tukiran; 2003).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maupun nasional, diperlukan data atau informasi statistik. Data statistik merupakan input yang sangat penting bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kebijakan pembangunan karena data statistik memberikan fakta yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan data statistik yang dapat dipercaya, penentu kebijakan dan pembuat keputusan dapat menggunakan ukuran yang objektif dan bukan berdasarkan pada persepsi individu di dalam membuat suatu keputusan. Program-program yang dihasilkan dari proses pembuatan keputusan yang benar cenderung akan lebih berhasil dengan baik dalam pencapaian sasaran pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Indikator kesejahteraan rakyat (Inkesra) merupakan salah satu informasi statistik yang menggambarkan keadaan sosial ekonomi suatu wilayah/regional. Dengan Inkesra yang disusun secara berkala, rencana pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah akan dapat memantau dan menilai hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Publikasi ini menyajikan gambaran mengenai taraf kesejahteraan rakyat dan perkembangannya antarwaktu. Untuk mengukur taraf kesejahteraan rakyat digunakan indikator dampak. Publikasi ini juga menyajikan indikator-indikator input, proses, dan output untuk

memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat serta proses dan manfaat dari program tersebut pada tingkat individu, keluarga, dan penduduk. Antara indikator input dan indikator dampak tidak selalu sejalan. Penjelasannya sederhana: input atau investasi dalam suatu program hanya akan memberikan dampak yang diharapkan jika implementasi program berjalan secara benar. Oleh karena itu, kesenjangan antara input dan dampak suatu program kesejahteraan rakyat sebaiknya dilihat sebagai pertanda adanya kekeliruan dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

Maksud dan Tujuan

Secara garis besar, tujuan publikasi ini disusun adalah untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Nagekeo. Secara khusus, Inkesra dapat digunakan oleh para perencana, penentu kebijakan, dan pembuat keputusan lainnya untuk: **pertama**, menilai hasil dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan rumah tangga; **kedua**, memantau dampak sosial dari pengeluaran masyarakat serta untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan pengeluaran masyarakat dan individu untuk berbagai jasa pelayanan masyarakat, **ketiga**, untuk mengukur kondisi, keadaan, dan perkembangan kesejahteraan penduduk, **keempat**, untuk menarik perhatian para perencana umum, pembuat kebijakan dan membandingkan antara berbagai masalah sosial, kesenjangan sosial serta untuk memantau perkembangan sepanjang waktu, dan **kelima**, untuk memantau kondisi kelompok penduduk pada lapisan masyarakat tertentu yang mungkin masih memerlukan perhatian dan bantuan khusus.

Sistematika

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Oleh karena itu, dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga, dan perumahan. Setiap aspek disajikan secara terpisah dan merupakan bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan atau dapat diukur. Publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan rakyat yang dapat diamati dan dapat diukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

Sumber data utama Inkesra 2022 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk. Susenas merupakan survei yang bertujuan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kondisi kesehatan, pendidikan, fertilitas, keluarga berencana, perumahan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Sementara itu, Sakernas merupakan survei yang bertujuan mengumpulkan data untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan secara berkesinambungan. Ketiga sumber data di atas merupakan data primer dalam arti dikumpulkan dan diolah oleh BPS. Selain menggunakan data primer, terbitan ini juga memakai data sekunder atau data yang berasal dari luar BPS.

Semua sumber data primer tersebut di atas sebenarnya mempunyai keterbatasan sebagai sumber informasi bagi publikasi tahunan seperti Inkesra ini. Misalnya dalam hal waktu pengumpulan datanya (*time reference*). Susenas walaupun pengumpulan datanya dilakukan setiap tahun, namun data yang serupa sejauh ini dikumpulkan setiap tiga tahun sekali (berupa modul).

Upaya untuk menyediakan sumber data yang tetap bagi publikasi Inkesra telah dilakukan oleh BPS melalui perluasan cakupan pertanyaan pokok Susenas (Kor Susenas) sejak tahun 1993 agar menjadi suatu alat untuk mengkaji dan memantau pelaksanaan pembangunan di sektor sosial atau kesejahteraan rakyat. Data dan indikator sektoral bidang kesejahteraan rakyat yang dapat dihasilkan melalui Susenas dapat digunakan setiap tahun untuk melihat dampak dan hasil dari upaya pembangunan manusia bagi kesejahteraan rakyat pada tingkat kabupaten/kota. Selain itu, data Susenas dapat digunakan untuk mengkaji kaitan antar variabel sektoral. Misalnya, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, pengeluaran dan konsumsi rumah tangga untuk mengungkap perkembangan fenomena tertentu misalnya perkembangan atau peningkatan kualitas hidup yang terjadi dari tahun ke tahun di suatu kabupaten/kota, karena data kor Susenas dikumpulkan setiap tahun. Dengan demikian, publikasi Inkesra akan mempunyai sumber data yang pasti dan berkesinambungan sehingga selalu dapat menyajikan data yang relatif *up-to date*.



1 KEPENDUDUKAN

JUMLAH PENDUDUDUK
KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2023

166 063
JIWA

LAKI-LAKI
82 059
JIWA



PEREMPUAN
84 004
JIWA



RASIO BEBAN KETERGANTUNGAN

Semakin tinggi angka beban ketergantungan akan menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi



ANAK-ANAK
44,08 %

Pada tahun 2022, 44 dari 100 penduduk nagekeo merupakan anak-anak serta 11 hingga 12 diantaranya juga penduduk lanjut usia (+65 tahun)

LANSIA
11,43 %



CHILD WOMEN RATIO (CWR)



Salah satu indikator perkembangan fertilitas ialah CWR. Indikator tersebut menunjukkan rasio antara balita dengan penduduk wanita tengah tahun usia 15-49 tahun



346
CWR NAGEKEO
TAHUN 2021



nagekeokab.bps.go.id



bps5318@bps.go.id



BPS Kabupaten
Nagekeo



[@bpsnagekeo](https://www.instagram.com/bpsnagekeo)

BAB I

KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah pusat pembangunan karena pada dasarnya penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Dengan demikian, perubahan kondisi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk akan berdampak pada situasi pembangunan nasional dan daerah. Selanjutnya, penanganan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi di suatu daerah seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemiskinan, dan pengangguran seharusnya didasarkan pada situasi kuantitas dan kualitas SDM penduduk. Itulah sebabnya, pembangunan tidak dapat mengabaikan aspek-aspek kependudukan. Dengan perkataan lain, perencanaan pembangunan seyogyanya berwawasan kependudukan, sehingga pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan: peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat karena esensi dari pembangunan adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang situasi kuantitas dan kualitas SDM penduduk serta keterkaitannya dengan pembangunan adalah penting.

Hubungan antara penduduk dan pembangunan dapat dijelaskan melalui suatu proses yang menggambarkan integrasi variabel demografi dan pembangunan, yang disebut siklus analisis demografi. Perubahan dalam tiga elemen pokok dinamika kependudukan yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi) dapat mempengaruhi jumlah, komposisi (struktur), dan persebaran (distribusi) penduduk. Perubahan dalam jumlah, struktur, dan distribusi penduduk dapat berpengaruh ke berbagai aspek pembangunan. Selanjutnya perubahan pada berbagai aspek pembangunan akan mempengaruhi kelahiran, kematian, dan perpindahan, demikian seterusnya.

Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan keseimbangan dinamis karena sifatnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan amat cepat yang terjadi perlu dicermati dan membutuhkan perhitungan terus-menerus agar hasilnya bermanfaat dalam membuat perencanaan yang sedapat mungkin relevan dengan kondisi kini maupun di masa depan, yang dapat diperkirakan berdasarkan data kependudukan masa kini maupun pada waktu lampau.

Oleh sebab itu, untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan, dibutuhkan data dan informasi yang baik mengenai berbagai aspek kependudukan, baik keadaan pada masa lalu, kini maupun perkiraan keadaan di masa yang akan datang. Namun demikian, belum baiknya sistem pencatatan registrasi penduduk di Indonesia mengakibatkan sebagian data atau bahkan keseluruhan data kependudukan yang tersedia selama ini masih diperoleh dari hasil Sensus Penduduk dan survei-survei kependudukan lainnya, seperti Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) (Fadjri, 2006).

Dalam bab ini akan diulas secara singkat mengenai kependudukan yang mencakup jumlah dan pertumbuhan, kepadatan, dan struktur/komposisi penduduk menurut beberapa karakteristik demografi seperti umur dan jenis kelamin, status perkawinan, rumah tangga, fertilitas dan keluarga berencana serta mobilitas penduduk.

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk merupakan suatu ukuran mengenai banyaknya penduduk yang mendiami suatu wilayah pada waktu tertentu. Perubahan keadaan penduduk baik jumlah, distribusi dan komposisi penduduk dari waktu ke waktu di satu daerah disebut dinamika penduduk. Dinamika penduduk dipengaruhi oleh banyaknya kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi) yang masuk atau keluar dari wilayah tersebut. Kelahiran yang terjadi akan bersifat penambah sedang kematian akan bersifat pengurang terhadap jumlah penduduk. Begitu pula halnya dengan migrasi. Jumlah penduduk yang masuk bersifat penambah sedangkan penduduk yang keluar bersifat mengurangi.

Perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu di suatu daerah dapat digambarkan melalui pertumbuhan penduduk yakni pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami disebabkan oleh selisih antara kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk total merupakan jumlah dari pertumbuhan penduduk alami dan migrasi neto (selisih migrasi masuk dan keluar). Pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara di masa yang akan datang yang selanjutnya akan melahirkan konsep proyeksi penduduk. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang politik misalnya mengenai jumlah pemilih

untuk pemilu yang akan datang. Tetapi prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci yakni tren fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Tabel 1.1 berikut memperlihatkan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Nagekeo selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2023

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nagekeo, 2020-2023

Tahun	Jumlah (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)
2020	159 732	2,07
2021	161 478	1,28
2022	163 804	1,42
2023	166 063	1,41

Sumber: Pengolahan BPS, Proyeksi Penduduk (2020-2050)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas nampak bahwa jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan penduduk yang cukup besar dengan peningkatan sebesar 2 326 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan pula oleh proyeksi jumlah penduduk Nagekeo pada tahun 2021 sebesar 161 478 jiwa dan di tahun 2022 menjadi 163 804 jiwa, sehingga laju pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 1,42 persen di tahun 2021.

Jumlah penduduk yang terus meningkat akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi maupun politik. Pertambahan penduduk berkaitan dengan persoalan penyediaan pangan, energi, fasilitas permukiman yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, fasilitas pendidikan yang berkualitas, ketersediaan lapangan kerja dan daya dukung lingkungan. Kemampuan bumi yang terbatas juga tidak mampu secara cepat menyuplai kebutuhan manusia yang bertambah dengan cepat. Faktor alam yang menjadi bahan pertimbangan utama adalah tanah, air, dan ruang. Akibatnya, selain terjadi penurunan daya dukung lingkungan, kesejahteraan penduduk pun mengalami penurunan. Ketidakmampuan

menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup berdampak pada naiknya angka pengangguran dan kemiskinan.

Kepadatan Penduduk

Bila jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu ditimbang dengan luas wilayahnya maka terbentuklah konsep tingkat kepadatan penduduk (*density ratio*). Kepadatan penduduk berkaitan dengan tingkat persebaran penduduk baik secara administratif maupun geografis. Persebaran dan kepadatan penduduk dipengaruhi oleh faktor fisiografis atau kondisi wilayah, tingkat pertumbuhan penduduk dan faktor kebudayaan dan teknologi. Penduduk umumnya lebih terkonsentrasi pada wilayah dataran yang subur dengan tingkat kemajuan budaya dan penggunaan teknologi yang lebih tinggi. Tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan umumnya lebih tinggi dibanding dengan wilayah pedesaan. Kepadatan penduduk berkaitan erat dengan kualitas lingkungan. Semakin padat penduduk maka semakin tinggi tingkat aktivitas sosial ekonomi yang akan berdampak pada kondisi lingkungan.

Tabel 1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nagekeo, 2021

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Mauponggo	102,52	25 061	244
Keo Tengah	65,62	15 859	242
Nangaroro	238,02	22 004	92
Boawae	325,42	41 518	128
Aesesa Selatan	71,00	7 505	106
Aesesa	432,29	44 431	103
Wolowae	182,09	6 085	33
NAGEKEO	1 416,96	162 463	115

Sumber: Sensus Penduduk 2020

Pada Tabel 1.2 terlihat bahwa kepadatan penduduk merupakan komponen yang dibentuk dari data jumlah penduduk dan luas wilayah. Kecamatan dengan kepadatan penduduk

terbesar adalah Kecamatan Mauponggo, hal ini disebabkan oleh karena wilayahnya hanya seluas 102,52 km² sedangkan jumlah penduduknya 25 061 jiwa. Hal ini berarti di Kecamatan Keo Tengah dalam setiap satu kilometer persegi ditempati oleh penduduk sebanyak 244 jiwa. Untuk distribusi penduduk terbesar masih didominasi oleh Kecamatan Aesesa sebesar 27,35 persen dan Kecamatan Boawae sebesar 25,56 persen. Sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Wolowae sebesar 3,75 persen.

Karakteristik Penduduk

Dalam pengetahuan tentang kependudukan dikenal istilah karakteristik penduduk. Karakteristik penduduk berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin, atau yang sering juga disebut struktur umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dapat dilihat dalam umur satu tahunan atau yang disebut juga umur tunggal (*single age*), dan yang dikelompokkan dalam lima tahunan. Dalam pembahasan demografi, pengertian umur adalah umur pada saat ulang tahun terakhir.

Di dalam analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (a) kelompok umur muda, di bawah 15 tahun; (b) kelompok umur produktif, usia 15 – 64 tahun; dan (c) kelompok umur tua, usia 65 tahun ke atas. Struktur umur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk umur muda sebanyak empat puluh persen atau lebih sementara kelompok umur tua kurang atau sama dengan lima persen. Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua apabila kelompok umur mudanya sebanyak tiga puluh persen atau kurang sementara kelompok umur tuanya lebih besar atau sama dengan sepuluh persen.

Suatu wilayah yang mempunyai karakteristik penduduk muda akan mempunyai beban besar dalam investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi penduduk di bawah 15 tahun ini. Dalam hal ini pemerintah harus membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar mulai dari perawatan ibu hamil dan kelahiran bayi, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, sarana tumbuh kembang anak termasuk penyediaan imunisasi, penyediaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar termasuk guru-guru dan sarana sekolah yang lain. Sebaliknya, suatu wilayah dengan ciri penduduk tua akan mengalami beban yang cukup besar dalam pembayaran pensiun, perawatan kesehatan fisik dan kejiwaan lanjut usia (lansia), pengaturan tempat tinggal dan lain-lain.

Tabel 1.3 Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Nagekeo, 2019-2023

Tahun	Struktur Umur (%)		
	0-14	15-64	65+
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	33,30	59,70	7,00
2020	33,02	59,82	7,15
2021	28,44	64,32	7,24
2022	28,34	64,30	7,35
2023	25,83	66,15	8,02

Sumber: BPS, SUSENAS 2019-2023

Tabel 1.3 di atas menunjukkan adanya perubahan kondisi demografis penduduk Kabupaten Nagekeo khususnya struktur umur. Di tahun 2019-2023 penduduk Kabupaten Nagekeo belum dianggap penduduk tua karena persentase penduduk tua (usia 65 tahun ke atas) masih kurang dari 10 persen sementara penduduk muda (usia 0-14 tahun) lebih dari 25 persen. Meskipun demikian, penduduk tua juga tetap membutuhkan perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah agar bisa menjalani kehidupan yang bermartabat.

Dalam kurun waktu 2019-2023 secara perlahan terjadi perubahan pada komposisi penduduk menurut umur. Terjadi peningkatan proporsi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dari 59,70 persen di tahun 2019 menjadi 66,15 persen di tahun 2023. Hal ini berbanding terbalik dengan proporsi usia muda dan penduduk usia tua yang mengalami perkembangan fluktuatif pada selang tahun yang sama. Pada penduduk usia muda kecenderungannya adalah menurun sedangkan pada penduduk usia tua berlaku hal sebaliknya. Perubahan komposisi umur penduduk di atas dapat diakibatkan oleh meningkatnya keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dan meningkatnya tingkat perbaikan kesehatan yang menyebabkan peningkatan usia harapan hidup serta menurunnya tingkat kematian.

Peningkatan proporsi penduduk usia produktif akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya tuntutan pelayanan akan pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi serta

perluasan kesempatan kerja. Selain itu, akibat dari peningkatan penduduk usia produktif adalah menurunnya rasio ketergantungan. Peningkatan penduduk usia produktif juga membuka kesempatan (*window of opportunity*) dalam perekonomian.

Struktur Penduduk Tua

Isu mengenai *population aging* (penuaan penduduk) telah menjadi suatu isu global. Proses terjadinya “penduduk tua” pada dasarnya karena adanya pergeseran komposisi umur penduduk. Penurunan fertilitas dan mortalitas di satu sisi dan meningkatnya angka harapan hidup (*life expectancy*) di sisi lain menyebabkan terjadinya proses penuaan penduduk, yang ditandai dengan penurunan jumlah penduduk muda dan balita, dan terjadinya peningkatan jumlah penduduk tua (lansia).

Secara biologis, penduduk tua atau lanjut usia (lansia) adalah penduduk yang telah menjalani proses penuaan, dalam arti menurunnya daya tahan fisik yang ditandai dengan semakin rentannya terhadap serangan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya usia, terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Proses penuaan berbeda dengan “pikun” (*senile dementia*), yaitu perilaku aneh atau sifat pelupa dari seseorang di usia tua. Pikun merupakan akibat dari tidak berfungsinya beberapa organ otak, yang dikenal dengan penyakit Alzheimer (Prihastuti, 2001).

Secara demografis, pengelompokan penuaan penduduk dapat dilihat dari beberapa ukuran yaitu *dependency ratio* (angka beban tanggungan), persentase penduduk lansia, dan dari sisi umur median penduduk. Dari sisi *dependency ratio*, suatu penduduk disebut sebagai penduduk tua jika *dependency ratio* penduduk tuanya di atas 10 persen. Dari persentase penduduk lansia (usia 65 tahun ke atas), struktur penduduk disebut sebagai penduduk tua jika persentase penduduk lansianya sudah mencapai sepuluh persen ke atas. Sedangkan dari umur median penduduk, sebuah penduduk disebut sebagai penduduk tua jika umur mediannya 30 tahun ke atas.

Jika dilihat dari jumlah dan persentase penduduk lansia (usia 65 tahun ke atas), seperti tersaji pada Tabel 1.4. tampak bahwa tahun 2023 penduduk lansia di Kabupaten Nagekeo berkembang secara fluktuatif dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan pada proporsi penduduk tua memberikan konsekuensi yang banyak terhadap berbagai aspek kehidupan. Sejalan dengan proses penuaan, kondisi fisik maupun nonfisik lansia mengalami

penurunan. Sebagai konsekuensinya diperlukan peningkatan kebutuhan pelayanan bagi penduduk lansia, khususnya pelayanan sosial.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) di Kabupaten Nagekeo Menurut Jenis Kelamin, 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Lanjut Usia (%)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	7,44	6,58	7,00
2020	7,20	7,12	7,15
2021	7,20	7,12	7,15
2022	7,54	7,17	7,35
2023	7,33	8,02	7,68

Sumber: BPS, SUSENAS 2019-2023

Beban Tanggungan

Perubahan komposisi penduduk menurut umur di atas memberi dampak pada angka beban ketergantungan yang menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja atau usia produktif (usia 15-64 tahun) terhadap penduduk usia tidak produktif (65 tahun ke atas dan usia kurang dari 15 tahun) untuk suatu periode waktu tertentu. Menurut konsep, penduduk muda di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Berdasarkan konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja atau usia produktif. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografis.

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk

membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 1.5 Rasio Beban Ketergantungan di Kabupaten Nagekeo, 2018-2022

Tahun	Rasio Beban Ketergantungan		Total
	Anak	Lanjut Usia	
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	54,92	10,90	65,82
2019	55,78	11,72	67,50
2020	41,50	11,33	50,83
2021	44,22	11,25	55,47
2022	44,08	11,43	55,51

Sumber: BPS, SUSENAS 2018-2022

Selama periode 2018-2022, terlihat rasio beban ketergantungan anak atau penduduk usia muda terhadap penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan rasio ketergantungan penduduk lanjut usia (lansia). Di Kabupaten Nagekeo pada tahun 2022 rasio ketergantungan anak atau penduduk usia muda sebesar 44,08 persen, sedangkan rasio ketergantungan penduduk lansia sebesar 11,43 persen. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 11 hingga 12 orang penduduk lanjut usia (usia 65 tahun ke atas) dan 44 hingga 45 orang anak atau penduduk usia muda (usia 0-14 tahun). Pada tahun 2022 beban ketergantungan penduduk usia muda (usia 0-14 tahun) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedangkan beban ketergantungan penduduk lanjut usia (usia 65 tahun ke atas) mengalami peningkatan. Walaupun demikian, beban ketergantungan dinilai masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nagekeo tampaknya belum dapat memasuki peluang yang diciptakan dari bonus demografi yakni kesempatan kemajuan perekonomian karena semakin rendahnya beban ketergantungan.

Rasio Jenis Kelamin

Perkembangan komposisi penduduk menurut jenis kelamin ditunjukkan dengan perkembangan rasio jenis kelamin (RJK), yaitu perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Tabel 1.6 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Nagekeo 2019-2023

Tahun	Kelompok Umur			Jumlah
	0 - 14	15 - 64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	100,51	89,36	106,29	94,01
2020	105,02	95,29	94,07	97,74
2021	104,86	95,54	92,32	97,72
2022	104,83	95,75	90,75	97,71
2023	104,80	95,92	89,33	97,68

Sumber: Publikasi BPS, Proyeksi Penduduk Provinsi NTT 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Tabel 1.6 di atas menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin di Nagekeo pada tahun 2019-2023 berada di bawah 100, ini berarti jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Nagekeo lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Pada tahun 2023 Rasio Jenis Kelamin (RJK) bernilai 97,68 yang artinya perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan adalah sekitar 97 hingga 98 berbanding 100. Tampak pada tabel 1.6, Rasio Jenis Kelamin (RJK) berbeda antar kelompok umur. Pada kelompok umur muda (0-14 tahun) RJK di atas 100, artinya lebih banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan. Pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) RJK di bawah 100, artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Terjadinya fenomena yang mengindikasikan bahwa daerah ini cenderung ditinggalkan merantau oleh penduduk laki-lakinya. Hal ini terlihat dari RJK pada kelompok umur produktif secara ekonomis yakni usia 15-64 tahun adalah terendah dibandingkan RJK umur muda dan tua.

Status Perkawinan

Perkawinan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dalam demografi status perkawinan penduduk dapat dibedakan menjadi status belum pernah kawin, kawin, pisah atau cerai, janda atau duda. Pada suatu daerah di mana pemakaian KB rendah, rata-rata umur penduduk saat menikah pertama kali serta lamanya seseorang dalam status perkawinan akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas. Usia kawin dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang berisiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

Konsep perkawinan dalam lingkup demografi dan kependudukan lebih difokuskan kepada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Dalam hal ini hidup bersama dapat dikukuhkan dengan perkawinan yang sah sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum yang ada (perkawinan *de jure*) ataupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Konsep ini dipakai terutama untuk mengaitkan status perkawinan dengan dinamika penduduk terutama banyaknya kelahiran yang diakibatkan oleh panjang-pendeknya perkawinan atau hidup bersama ini.

Norma dan adat di Indonesia menghendaki adanya pengesahan perkawinan secara agama maupun secara undang-undang. Tetapi untuk keperluan studi demografi, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan seseorang berstatus kawin apabila mereka terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik yang tinggal bersama maupun terpisah, yang menikah secara sah maupun yang hidup bersama yang oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri. Definisi luas tentang perkawinan ini digunakan BPS karena dalam kenyataannya pada suatu masyarakat sering ditemukan banyak pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Seringkali hal ini disebabkan karena persyaratan perkawinan yang sah memberatkan kedua belah pihak yang hendak menikah, misalnya biaya perhelatan adat yang terlampau tinggi, tidak mampu membayar biaya memproses perkawinan yang sah atau biaya mahar yang tidak terjangkau oleh pasangan yang hendak menikah secara resmi.

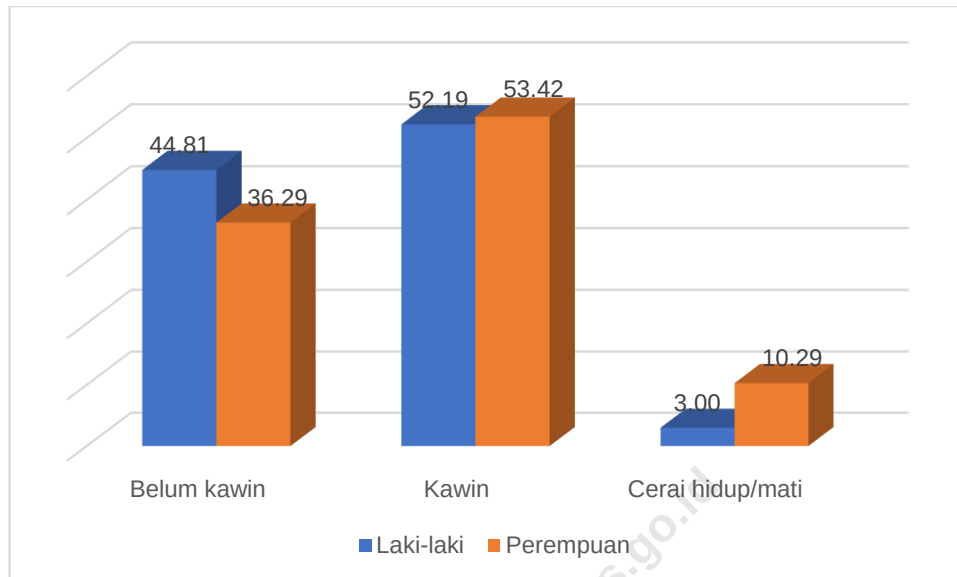
Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan, terutama dalam hal pengembangan program-program peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga. Perkawinan usia dini akan berdampak pada rendahnya

kualitas keluarga, baik ditinjau dari sisi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga, maupun kesiapan fisik bagi remaja calon ibu dalam mengandung dan melahirkan bayinya. Dalam hal kehamilan yang tidak dikehendaki karena usia calon ibu masih sangat muda, ada risiko pengguguran kehamilan yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman secara medis. Pengguguran kandungan semacam ini dapat berakibat komplikasi aborsi. Program konseling maupun pelayanan kesehatan reproduksi remaja akan dapat dilakukan secara tepat apabila diketahui berapa banyaknya dan dimana terdapat perkawinan usia dini.

Diketuinya berapa besar pasangan usia subur (persentase perempuan usia subur yang berstatus kawin) akan memudahkan para perencana program KB untuk mempersiapkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dan dikemudian hari anak-anak yang dilahirkan para ibu ini akan menjadi generasi yang sehat dan berpotensi tinggi sebagai sumber daya manusia yang handal. Dari sisi lain, data mengenai banyaknya pasangan suami isteri serta rata-rata umur kawin laki-laki dan perempuan akan menjadi bahan utama pengembangan kebijakan penyediaan pelayanan dasar lainnya seperti pengembangan perumahan, kebutuhan peralatan rumah tangga disesuaikan dengan kemampuan daya beli, keperluan alat transportasi, dan lain-lain.

Distribusi atau komposisi penduduk menurut status perkawinan, baik penduduk perempuan maupun penduduk laki-laki disajikan pada Gambar 1.1. Dari grafik tersebut terbaca di tahun 2021 persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai (baik cerai hidup atau cerai mati) lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk laki-laki.

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nagekeo, 2022



Sumber: BPS, SUSENAS 2022

Ada beberapa alasan yang bisa menerangkan fenomena yang melatarbelakangi persentase penduduk perempuan yang bercerai cenderung lebih tinggi dari penduduk laki-laki. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan BPS (BPS 1993 dan 1997) diketahui bahwa laki-laki yang bercerai akan segera menikah atau membentuk rumah tangga baru, sementara perempuan cenderung untuk memfokuskan perhatian mereka untuk mengurus anak-anaknya hingga mampu hidup mandiri.

Fertilitas dan Keluarga Berencana

Fertilitas

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk selain migrasi masuk. Kelahiran bayi membawa konsekuensi pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi tersebut, termasuk pemenuhan gizi dan kecukupan kalori dan perawatan kesehatan. Pada gilirannya, bayi ini akan tumbuh menjadi anak usia sekolah yang menuntut pendidikan, lalu masuk angkatan kerja dan menuntut pekerjaan. Bayi perempuan akan tumbuh menjadi remaja perempuan dan perempuan usia subur yang akan menikah dan melahirkan bayi.

Salah satu indikator perkembangan fertilitas ialah *Child Women Ratio (CWR)* atau Rasio Anak-Ibu. Indikator tersebut menunjukkan rasio antara balita (anak usia 0-4 tahun) dengan

penduduk wanita tengah tahun usia 15-49 tahun. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.7 berikut, CWR pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan sebesar 0,57 persen dari 348 menjadi 346. Hal ini berarti, setiap 1000 orang perempuan usia 15-49 tahun mempunyai balita sebanyak sekitar 348 orang di tahun 2020 dan 346 orang di tahun 2021.

Tabel 1.7 Rasio Anak-Ibu (*Child Women Ratio*) Kabupaten Nagekeo 2020-2021

Variabel	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
P ₀₋₄	14 797	14 895
P ^f ₁₅₋₄₉	42 532	43 063
CWR	348	346

Sumber: Sensus Penduduk 2020

Keluarga Berencana

Menurut UU RI Nomor 52 Tahun 2009, Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Salah satu tugas pokok pembangunan KB menuju pembangunan keluarga sejahtera adalah melalui upaya pengaturan kelahiran yang dapat dilakukan dengan pemakaian kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi sehingga dapat mengurangi resiko kematian dan kesakitan dalam kehamilan. Konsep keluarga kecil dua anak cukup dengan cara mengatur jarak kelahiran melalui berbagai metode kontrasepsi masih tetap menjadi perhatian program KB di Indonesia dalam era baru saat ini.

Data pada Tabel 1.8 berikut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 lebih dari separuh yakni sebesar 54,74 persen wanita usia subur dan berstatus kawin di Nagekeo tidak menggunakan alat kontrasepsi sedangkan 35,49 persen wanita usia subur berstatus kawin yang pernah menggunakan alat kontrasepsi. Rendahnya partisipasi penggunaan alat kontrasepsi pada wanita kawin usia subur ditandai dengan masih tingginya penduduk wanita yang melangsungkan perkawinan pertamanya pada usia yang belum siap (10-19 tahun), hal ini

berpotensi pada risiko peningkatan pertumbuhan penduduk alami, kenaikan tingkat kematian bayi (*infant mortality rate*) dan tingkat kematian ibu.

Tabel 1.8 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Nagekeo, 2020-2022

Pemakaian Alat Kontrasepsi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Tidak pernah	42,47	50,46	57,93
B. Pernah memakai	57,53	49,54	42,07
- <i>Sedang memakai</i>	35,76	36,22	31,44
- <i>Tidak memakai lagi</i>	21,78	13,33	10,63

Sumber: BPS, SUSENAS 2010-2022

Secara teoritis, partisipasi dalam program KB atau penggunaan metode kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh faktor sosio-demografi, sosio-psikologi dan faktor yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau KB. Faktor sosio-demografi dapat berupa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status pekerjaan. Perumahan, gizi, umur dan faktor suku dan agama. Faktor sosio psikologi dapat berupa pandangan mengenai ukuran keluarga ideal, nilai anak, sikap terhadap KB, komunikasi suami istri dan persepsi tentang kematian anak. Faktor yang berhubungan dengan pelayanan meliputi akses terhadap pelayanan KB, pengetahuan tentang kontrasepsi, jarak ke pusat pelayanan KB dan paparan dengan media massa (Bertrand;1980).

Dalam kajian analisis hasil SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia), sebagian besar responden (wanita usia 15-49 tahun) tidak menggunakan alat kontrasepsi lebih banyak didasarkan atas alasan ketidak inginan dibandingkan dengan ketidakmampuan. Ketidakmampuan disebabkan oleh persoalan minimnya pengetahuan responden tentang program KB. Sementara itu, faktor ketidak inginan lebih banyak dipengaruhi oleh adanya perasaan ketidaknyamanan dan ketakutan terhadap masalah kesehatan (seperti efek samping) serta adanya tantangan dari pihak lain, seperti tantangan dari suami atau keluarga lainnya.



2

KESEHATAN & GIZI

**PERSENTASE PENDUDUK
YANG MENGALAMI KELUHAN
KESEHATAN TAHUN 2023**



**PEREMPUAN
32,46 %**



**LAKI-LAKI
17,28 %**



RS PEMERINTAH 57,58 %



PUSKESMAS 37,88 %

**PEMANFAATAN FASILITAS
KESEHATAN TAHUN 2022**

**PENOLONG
PERSALINAN**



**DOKTER KANDUNGAN 41 %
BIDAN 57 %
DOKTER UMUM 3 %**



nagekeokab.bps.go.id



bps5318@bps.go.id



BPS Kabupaten
Nagekeo



@bpsnagekeo

BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

Menurut UU Kesehatan tahun 1992, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Derajat atau kualitas kesehatan yang tinggi merupakan salah satu hak dasar (*fundamental right*) dari setiap manusia tanpa harus membedakan suku, bangsa, agama, aliran politik, keadaan ekonomi dan sosialnya (Konstitusi WHO 1948). Menurut Broto (2003), kualitas kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkait, saling berpengaruh dan saling berinteraksi seperti kondisi lingkungan, gaya hidup (*life style*), demografi, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.

Di dalam laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO 2000 dalam Ambar 2002), ada tiga tujuan fundamental dari sebuah sistem kesehatan: *pertama*, meningkatkan kesehatan warga negara; *kedua*, merespons kebutuhan dan harapan warga negara akan kesehatan; dan *ketiga* adalah melindungi penduduk miskin dari pembiayaan kesehatan yang mahal ketika mereka jatuh sakit.

Kesehatan yang baik akan mempunyai peran penting dalam memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi melalui empat cara (World Bank 1993 dalam Broto 2003) yaitu pertama, berkurangnya kerugian produksi akibat absensi tenaga kerja karena sakit. Kedua, penduduk dapat lebih mampu memanfaatkan sumber-sumber alam (*natural resources*). Ketiga, anak-anak dapat masuk sekolah secara teratur dan mempunyai kemampuan belajar yang lebih baik. Keempat, pendapatan dan tabungan tidak terkuras untuk mengobati penyakit yang mungkin sangat mahal ongkosnya.

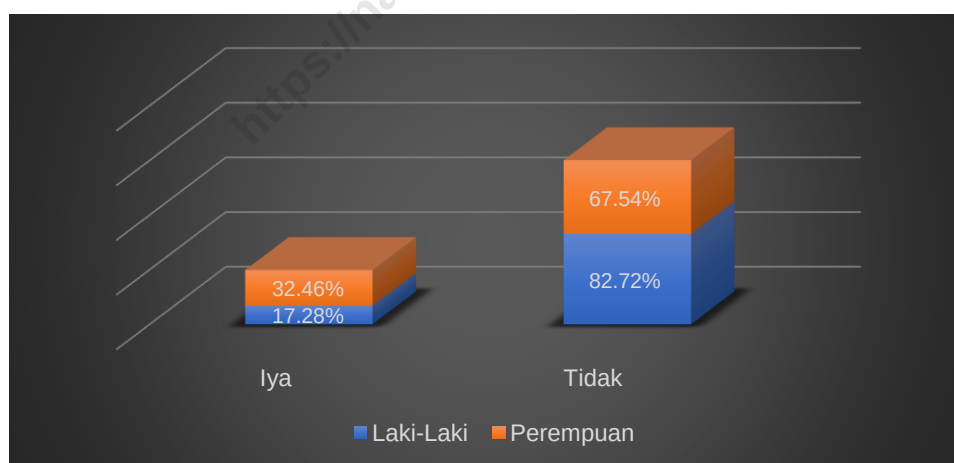
Pada bab ini diulas beberapa indikator kesehatan. Indikator utama yang biasa digunakan untuk melihat derajat kesehatan adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain derajat kesehatan, aspek penting lainnya adalah status kesehatan yang dapat diukur dengan beberapa indikator seperti angka kesakitan dan status gizi. Beberapa indikator pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti penolong persalinan dapat memberikan gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan derajat dan status kesehatan masyarakat.

Morbiditas

Status kesehatan masyarakat diukur dengan menggunakan angka kesakitan yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang selama satu bulan terakhir mempunyai satu atau lebih keluhan kesehatan seperti panas, batuk, pilek, asma, diare, sakit gigi, sakit kepala berulang dan lainnya yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari (seperti pekerjaan, sekolah, dan kegiatan lainnya). Keluhan kesehatan yang dimaksud di sini adalah sepenuhnya berdasarkan pengakuan responden, bukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atau petugas kesehatan lainnya.

Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan misalnya, akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator angka kesakitan (*morbidity rate*) dan lama hari sakit.

Gambar 2.1 Persentase Jumlah Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Terganggunya Aktivitas di Kabupaten Nagekeo, 2023



Sumber: BPS, SUSENAS 2023

Pada tahun 2023 terlihat bahwa terdapat 17,28 persen penduduk laki-laki dan 32,46 persen penduduk perempuan mengalami gangguan kesehatan. Persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan menyatakan mengganggu aktivitas sehari-hari lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Tabel 2.1 Persentase penduduk dengan Lama Hari Sakit di Kabupaten Nagekeo, 2021-2023

Tahun	Persentase Lama Hari Sakit 4-30 hari
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
2021	...
2022	...
2023	1,10

Sumber: BPS, SUSENAS 2021-2023

Tabel 2.2 menggambarkan bahwa persentase lama hari sakit (4-30 hari) selama tiga tahun terakhir. Dalam rentan waktu 4 hingga 30 hari jumlah lama sakit yang mengharuskan untuk dilakukan perawatan secara intens atau rawat inap selama 21 hari. Dari 1,10% penduduk yang mengalami rawat inap rata-rata jumlah lama sakitnya yaitu 7,54 hari atau sekitar 7 hingga 8 hari rawat inap.

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Di dalam perencanaan kesehatan, tingkat penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan sangat penting. Dengan diketahuinya tingkat penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan, pemerintah sebagai pemegang regulasi dapat menentukan prioritas-prioritas kebijakan pelayanan kesehatan serta alokasi sumber daya yang ada.

Pembangunan kesehatan yang telah diselenggarakan dalam beberapa dekade ini telah berhasil menyediakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat secara merata di seluruh pelosok daerah ini. Di setiap kecamatan di Kabupaten Nagekeo telah memiliki paling sedikit sebuah puskesmas. Di sektor swasta, pelayanan kesehatan dasar diselenggarakan dalam bentuk dokter praktek, bidan praktek, klinik/balai pengobatan swasta dan rumah bersalin.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk Kabupaten Nagekeo Yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat, 2020 dan 2023

Tempat/cara Berobat	2020	2023
(1)	(2)	(3)
- Rumah Sakit Pemerintah	4,38	57,58
- Rumah Sakit Swasta	0,54	1,52
- Praktek Dokter/Bidan	5,42	0,00
- Klinik/Praktek Dokter Bersama	8,72	1,52
- Puskesmas/Puskesmas Pembantu	54,27	37,88
- UKBM/Praktek Pengobatan Tradisional/lainnya	31,22	1,52

Keterangan : Persentase terhadap seluruh jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan
 Sumber : BPS, SUSENAS 2020 & 2023

Pada Tabel 2.3 tersaji persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat atau cara berobat selama tahun 2023 yang coba dibandingkan dengan tahun 2020. Terdapat peningkatan yang melakukan pengobatan di rumah sakit pemerintah dari yang sebelumnya 4,38 persen menjadi 57,58 persen. Nampak bahwa Rumah Sakit Pemerintah merupakan tempat pelayanan kesehatan yang paling populer dibanding sarana pelayanan lain. RS Pemerintah dimanfaatkan oleh lebih dari 50 persen penduduk dengan keluhan kesehatan. Hal tersebut dapat menjadi indikasi dari mulai lengkapnya fasilitas kesehatan pada RS Pemerintah di Kabupaten Nagekeo. Puskesmas masih menjadi tepat berobat dengan persentase terbanyak kedua setelah RS Pemerintah yaitu sebesar 37,88 persen.

Penolong Persalinan

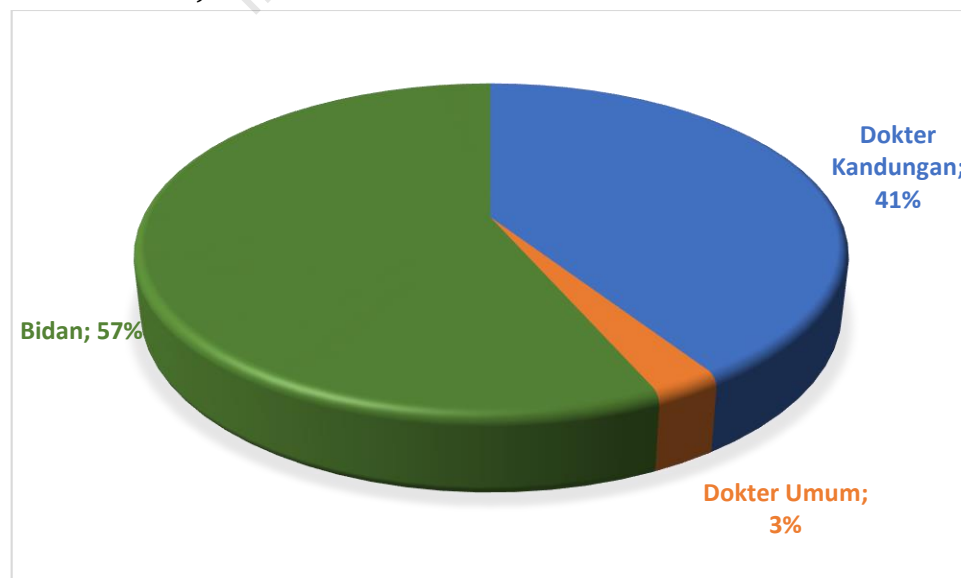
Sumber daya manusia yang berkualitas harus dipersiapkan sejak dini. Dengan demikian, kesehatan balita yang merupakan generasi penerus mutlak diperhatikan. Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu (status gizi sebelum dan sesudah kehamilan) dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah proses penolong kelahiran. Selain mempengaruhi kesehatan balita, penolong persalinan juga berpengaruh terhadap peluang kematian bayi dan ibu.

Proses persalinan merupakan satu fase penting dalam kehidupan manusia. Keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi sangat ditentukan oleh tenaga penolong saat proses kelahiran berlangsung. Proses persalinan meliputi 4 kala, yaitu pembukaan 1-10 (kala 1), keluarnya bayi (kala 2), keluarnya uterus (kala 3) dan pasca kala 3 yang berlangsung selama 2 jam (kala 4).

Penolong persalinan yang disajikan dalam analisis ini dibagi atas dua kategori yakni kategori tenaga medis dan kategori bukan tenaga medis. Kategori tenaga medis terdiri atas dokter, bidan dan tenaga medis lainnya. Sementara itu, kategori bukan tenaga medis terdiri atas dukun, famili dan lainnya. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter, bidan, dan paramedis dianggap lebih baik dari kelahiran yang ditolong oleh bukan tenaga medis (dukun, famili, atau lainnya).

Penolong proses kelahiran secara operasional Susenas mencakup tenaga yang menolong proses persalinan sepanjang kala 1 hingga kala 3. Persentase penolong terakhir dalam proses persalinan diperoleh dengan menanyakan pada wanita pernah kawin berusia 15 – 49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pada persalinan terakhir dalam referensi waktu dua tahun yang lalu hingga saat pencacahan

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10-54 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2023



Sumber: BPS, SUSENAS 2023

Dari Gambar 2.4 di atas dapat dilihat bahwa proses kelahiran penduduk perempuan usia subur seluruhnya ditolong oleh tenaga medis terutama bidan. Hal ini didukung oleh semakin banyaknya fasilitas kesehatan yang ada di setiap desa di Kabupaten Nagekeo. Dengan adanya pemerataan fasilitas kesehatan, maka tenaga medis yang tersedia juga semakin banyak dan tersebar di seluruh desa, sehingga memudahkan masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan terdekat.

<https://nagekeokab.bps.go.id>



3

PENDIDIKAN

ANGKA MELEK HURUF

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan untuk dapat menuju hidup sejahtera



LAKI-LAKI

98,18 %



PEREMPUAN

96,78 %

APK



SD
109,12



SMP
85,62



SMA
91,74

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

APK merupakan rasio penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikan tertentu

APM



SMA
64,22



SMP
80,39



SD
98,48

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

APM merupakan rasio antara jumlah siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan yang diduduki dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama



nagekeokab.bps.go.id



bps5318@bps.go.id



BPS Kabupaten Nagekeo



@bpsnagekeo

BAB III

PENDIDIKAN

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan dalam suatu wilayah. Kualitas SDM menjadi semakin penting dan strategis dengan kondisi globalisasi yang ditandai dengan persaingan yang makin kompetitif di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kondisi SDM yang berkualitas rendah akan merugikan pembangunan yang dijalankan oleh suatu wilayah. Dengan kata lain, rendahnya kualitas SDM akan menghambat pembangunan sehingga tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat.

Bersama-sama dengan sektor kesehatan, pendidikan menjadi penting dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Pendidikan dapat dianggap sebagai sarana investasi yang mampu membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tenaga kerja sebagai modal untuk dapat bekerja lebih produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilannya di masa datang (Suryadi 1999 dalam Prihastuti 2007).

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari penduduk sebagai target. Informasi jumlah penduduk khususnya penduduk usia sekolah di masa kini dan di masa depan penting diketahui agar dapat dipersiapkan berbagai fasilitas pendidikan. Perkembangan jumlah penduduk usia sekolah merupakan informasi penting berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan antara lain fasilitas gedung sekolah dan sarana penunjang pendidikan serta tenaga pengajar. Dengan mengetahui informasi tentang jumlah penduduk usia sekolah dapat diperkirakan kebutuhan fasilitas gedung sekolah dan tenaga pengajar yang dibutuhkan di suatu wilayah. Walaupun tidak semua penduduk usia sekolah benar-benar duduk di bangku sekolah. Hal ini disebabkan oleh sebagian dari penduduk usia sekolah tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi karena tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya atau putus sekolah.

Selain fasilitas pendidikan dan regulasi yang tepat di bidang pendidikan, kualifikasi tenaga pengajar juga menentukan keberhasilan di sektor pendidikan. Kualifikasi tenaga pengajar dan kesesuaian antara keahlian dengan bidang keahlian yang diajarkan turut menentukan keberhasilan peserta didik dan pendidikan. Rendahnya kualifikasi tenaga

pengajar atau guru menunjukkan masih rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya kualitas tenaga pengajar akan berdampak pada kualitas siswa yang tergambar melalui rendahnya mutu para lulusan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya bertumpu pada kuantitas melainkan juga kualitas anak didik sebagai persiapan memasuki dunia kerja.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Angka melek huruf adalah ukuran yang sangat kasar karena hanya memperhatikan kemampuan membaca dan menulis. Angka melek huruf menjadi penting karena kemampuan membaca dan menulis berkaitan erat dengan aliran informasi yang dapat diperoleh penduduk. Selain angka melek huruf, terdapat angka partisipasi sekolah yang mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah pada suatu jenjang pendidikan formal tertentu dan tingkat pendidikan yang ditamatkan yang mengukur tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk.

Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan untuk dapat menuju hidup sejahtera dan mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial-ekonomi suatu bangsa atau wilayah. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya. Angka melek huruf penduduk Kabupaten Nagekeo pada tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten Nagekeo Menurut Jenis Kelamin, 2023 (persen)

➤ Laki-laki	98,18
➤ Perempuan	96,78
➤ Laki-laki + Perempuan	97,47

Sumber: BPS, SUSENAS 2023

Dari tabel 3.1. terlihat pada tahun 2023 angka melek huruf penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Tetapi secara keseluruhan angka melek huruf di Kabupaten Nagekeo cukup tinggi yaitu sebesar 97,47 persen. Peningkatan persentase penduduk yang melek huruf menunjukkan keberhasilan peningkatan di bidang pendidikan suatu daerah. Hal ini terjadi karena pemberantasan buta huruf erat kaitannya dengan pendidikan yang juga dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduk. Karena penduduk yang buta huruf tersebut identik dengan kemiskinan pengetahuan, keterampilan, dan keterbelakangan.

Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan suatu indikator yang menunjukkan daya serap suatu jenjang pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. Ukuran ini juga berguna untuk mengatasi kelemahan pada statistik pendidikan yang umumnya digunakan di sekolah-sekolah seperti perubahan jumlah murid yang hanya menggambarkan daya tampung suatu sekolah dalam menerima peserta didik. Dalam hal ini peningkatan jumlah murid tidak berarti peningkatan partisipasi sekolah karena peningkatan tersebut dapat dipicu oleh pertambahan jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diikuti dengan peningkatan penyediaan infrastruktur pendidikan.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk yang Sedang Bersekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2023

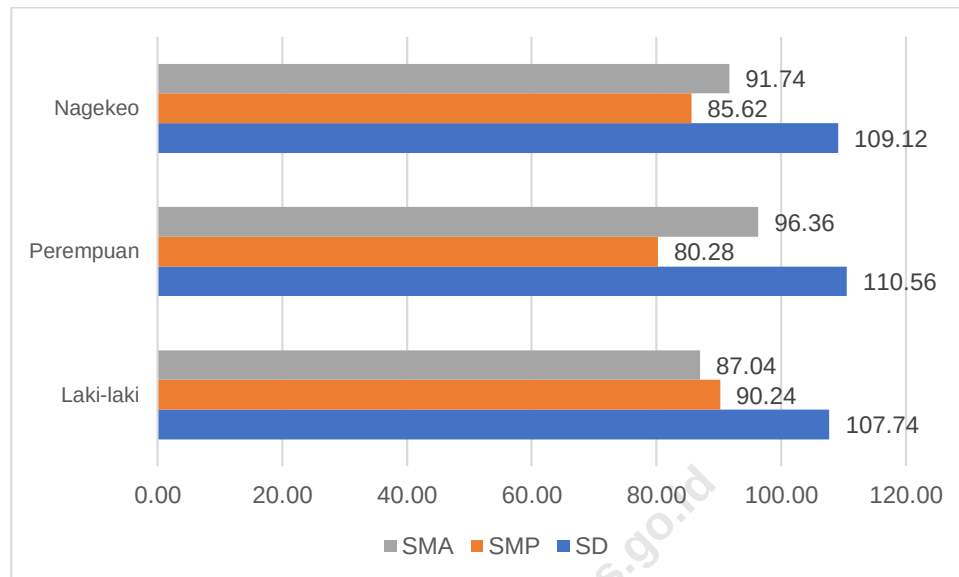
Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
7-12	97,62	99,38
13-15	93,90	95,77
16-18	78,33	65,57

Sumber: BPS, SUSENAS 2023

Tabel 3.2 di atas menunjukkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Angka partisipasi sekolah penduduk laki-laki dan wanita tidak terlalu jauh berbeda, dengan angka partisipasi sekolah wanita selalu lebih tinggi pada setiap kelompok umur. Secara umum, tingkat partisipasi cenderung berbanding terbalik dengan usia. Semakin tinggi usia, tingkat partisipasi sekolah justru semakin menurun. Kondisi di atas dapat dikaitkan dengan kemudahan akses pendidikan dasar yakni SD atau Sederajat dan SMP atau Sederajat. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMA atau Sederajat dan Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan yang lebih susah dijangkau baik karena ketersediaan infrastruktur yang terbatas maupun biaya pendidikan yang lebih tinggi. Jika dilihat menurut jenis kelamin, maka Tabel 3.2 menginformasikan lebih dalam bahwa pada partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 dan 16-18 tahun untuk penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Keadaan ini dapat disebabkan oleh mulai timbul kesadaran akan pentingnya pendidikan mendorong partisipasi kaum perempuan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi.

Dalam analisis statistik pendidikan menggunakan tingkat partisipasi sekolah, umumnya terdapat dua indikator utama yakni angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APK menggambarkan partisipasi penduduk pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan kesesuaian usia dengan jenjang pendidikan yang diduduki. Artinya, APK merupakan rasio penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikan tertentu. Sementara itu, APM merupakan rasio antara jumlah siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan yang diduduki dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Usia standar untuk suatu jenjang pendidikan adalah 7-12 tahun untuk SD, 13-15 tahun untuk SMP, 16-18 tahun untuk SMA dan 19 tahun ke atas untuk pendidikan tinggi.

Gambar 3.1 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagekeo, 2023

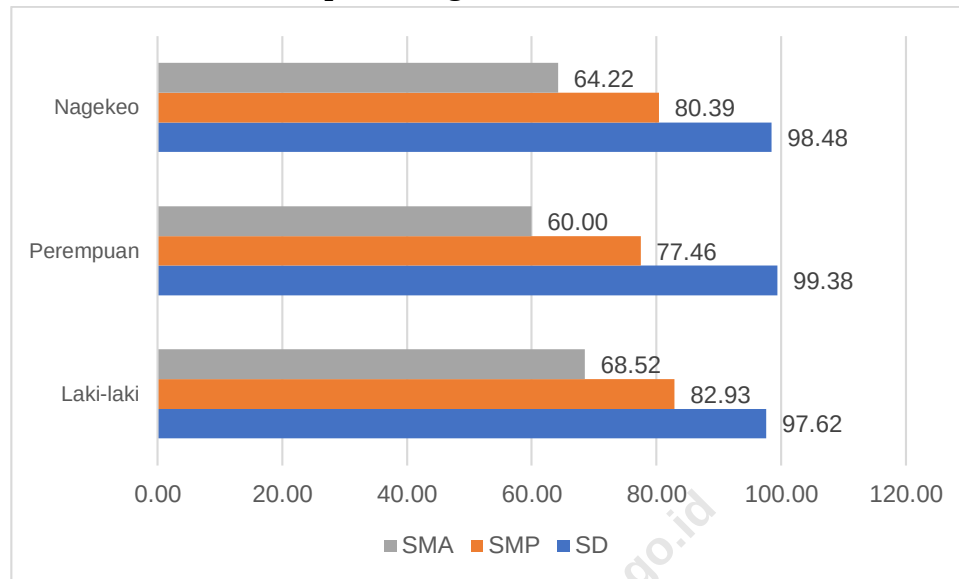


Sumber: BPS, SUSENAS 2023

Gambar 3.1 di atas menunjukkan angka partisipasi kasar (APK) menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan di Kabupaten Nagekeo tahun 2023. Secara umum terlihat, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah juga nilai APK tersebut. Hal ini Nampak pada APK SD lebih tinggi dibandingkan APK SMP dan SMA. Hal ini disebabkan terdapat sekelompok penduduk dari kelompok usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun yang masih duduk di bangku SD.

Selain APK, indikator yang umum digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap sektor pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan partisipasi sekolah penduduk kelompok usia yang sesuai dengan kelompok usia standar suatu jenjang pendidikan. Selisih antara APM dan APK menunjukkan proporsi siswa yang tinggal kelas atau terlalu cepat atau lambat bersekolah. Meskipun demikian, APM memiliki kelemahan karena akan bersifat *underestimate* jika terdapat siswa di luar usia standar untuk suatu jenjang pendidikan. APM untuk Kabupaten Nagekeo menurut jenis kelamin dan kelompok umur disajikan pada Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagekeo, 2023



Sumber: BPS, SUSENAS 2023

Sama halnya dengan APK, APM juga cenderung menurun seiring semakin tingginya jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD nilai APM Kabupaten Nagekeo bernilai 98,68 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 7-12 tahun terdapat 98 orang yang sedang bersekolah di SD.

Kemajuan pembangunan pendidikan bukanlah hal mudah untuk dicapai. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan antara lain rendahnya jangkauan (*coverage*) dan akses pada pelayanan pendidikan terutama bagi penduduk kurang mampu dan penduduk yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil karena pendidikan menengah dan tinggi umumnya hanya terdapat di pusat-pusat kecamatan dan kota kabupaten. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah terutama jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Selain itu, kemiskinan dan biaya sekolah yang tinggi turut menjadi penyebab rendahnya partisipasi sekolah masyarakat. Kemiskinan dan tingginya biaya sekolah menjadi pemicu banyaknya siswa yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan, 2023

Status Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Nagekeo
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum bersekolah	4,74	4,28	4,51
Masih sekolah SD/ sederajat	16,50	16,20	16,35
Masih sekolah SMP/ sederajat	6,75	5,19	5,97
Masih sekolah SMA/ sederajat	4,28	3,82	4,05
Masih sekolah Perguruan Tinggi	1,28	1,46	1,37
Tidak Bersekolah lagi	66,45	69,06	67,76

Sumber: BPS, SUSENAS 2023

Pada Tabel 3.3 disajikan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas dengan status jenjang pendidikan yang sedang dijalani. Diketahui bahwa sekitar 27 persen penduduk usia 5 tahun ke atas yang saat ini sedang bersekolah. Kelompok jenjang pendidikan yang paling banyak sedang dijalani adalah SD sederajat.

Pendidikan yang Ditamatkan

Hasil pendidikan merupakan hasil yang diperoleh dari adanya proses belajar-mengajar sebagai bagian dari proses pendidikan, yang dapat ditunjukkan dari jumlah penduduk yang berhasil tamat atau jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan tertentu. Hal ini secara spesifik dapat dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk berumur 10 tahun ke atas. Komposisi penduduk menurut ijazah tertinggi yang dimiliki memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia. Dilihat dari jumlah penduduk yang berhasil tamat pada jenjang pendidikan tertentu dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Nagekeo masih jauh dari harapan.

Gambar 3.4 berikut menunjukkan bahwa dari sisi jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Nagekeo berusia lima belas tahun ke atas pada tahun 2022, paling banyak memiliki ijazah SD sebesar 37,49 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP dan SMA ke atas lebih rendah yaitu sebesar 18,26 persen dan 27,55 persen.

Gambar 3.3. Persentase Penduduk Nagekeo Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki, 2023



Sumber: BPS, SUSENAS 2023

Rendahnya tingkat pendidikan yang ditunjukkan oleh pendidikan yang ditamatkan dan rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang yang lebih tinggi mengindikasikan adanya persoalan pada dunia pendidikan. Persoalan-persoalan yang dimaksud dapat berupa minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi seperti SMA/SMK/Sederajat dan pendidikan tinggi sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah pedesaan. Faktor lain yang turut menyumbang adalah keterbatasan sarana penunjang pendidikan, persebaran guru yang tidak merata dan persoalan kualifikasi guru. Selain itu, masih ada pula faktor kemiskinan yang menyebabkan biaya pendidikan menjadi tidak terjangkau. Selain itu, bagi penduduk miskin atau berpendapatan rendah menyekolahkan anak akan mengurangi *opportunity cost* (*kesempatan untuk mendapatkan uang*) sehingga anak putus sekolah dan terjun dalam dunia kerja. Rendah tingginya pendidikan mencerminkan keadaan kualitas sumber daya manusia terutama angkatan kerja di Kabupaten Nagekeo.

KETENAGAKERJAAN

4



LAKI-LAKI
41 739 Jiwa



PEREMPUAN
35 123 Jiwa

**ANGKATAN
KERJA**

TAHUN 2022



71,02 %

**TINGKAT PERTISIPASI
ANGKATAN KERJA (TPAK)
TAHUN 2022**

Merupakan perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)

2,97 %

Rendahnya tingkat pengangguran tersebut sangat berkaitan erat dengan konsep bekerja “minimal satu jam”

**TINGKAT PENGAGGURAN
TERBUKA (TPT)
TAHUN 2022**



nagekeokab.bps.go.id



bps5318@bps.go.id



BPS Kabupaten
Nagekeo



@bpsnagekeo

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Dalam kaitan dengan ketenagakerjaan, penduduk dibagi atas dua kelompok yakni penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Dalam literatur usia kerja umumnya adalah 15-64 tahun. Penduduk usia kerja tersebut terbagi dalam dua kategori yakni yang termasuk dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dalam kelompok penduduk yang bekerja dapat dianalisis lebih jauh apakah tergolong bekerja penuh atau setengah menganggur misalnya dari sisi produktivitas, pendapatan, kesesuaian keahlian dengan jenis pekerjaan dan lapangan usaha. Yang tidak termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Sementara itu, konsep bekerja yang digunakan BPS adalah melakukan kegiatan ekonomi yang dimaksudkan untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, termasuk mereka yang bekerja tetapi tidak dibayar, termasuk pula yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai alasan (cuti, menunggu panen, mogok, dsb).

Masalah tenaga kerja tidak bisa dipisahkan dengan masalah kependudukan dan ekonomi. Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah penduduk usia kerja pun terus meningkat, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Penduduk yang besar merupakan sumber dari ketersediaan tenaga kerja dan modal dasar bagi pembangunan nasional jika didukung oleh adanya kualitas penduduk yang memadai baik dari segi pendidikan, keahlian maupun keterampilan yang dimiliki. Dari sisi ekonomi, penduduk yang bekerja merupakan salah satu penggerak utama perekonomian karena terlibat langsung dalam proses produksi yang menggerakkan roda perekonomian.

Meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan pangan, sandang, perumahan, melainkan juga perlunya perluasan kesempatan kerja. *Supply* atau ketersediaan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan sektor ekonomi untuk menyerap tenaga kerja akan menimbulkan persoalan utama yaitu

pengangguran. Lapangan kerja semakin sempit sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Jika masalah pengangguran ini tidak mendapatkan perhatian yang serius, bisa menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat di samping sulitnya mencapai keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

Terkait dengan hal ini, diperlukan indikator-indikator yang mampu menggambarkan keadaan angkatan kerja dan tenaga kerja untuk selanjutnya dijabarkan sebagai dasar penentuan arah kebijakan ketenagakerjaan. Dalam bab ini diulas secara singkat keadaan angkatan kerja dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain TPAK, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi antara lain kesempatan kerja, lapangan usaha dan status pekerjaan, tingkat pendidikan pekerja dan jam kerja. Dari besaran indikator-indikator tersebut dapat diketahui keadaan ketenagakerjaan saat ini dan hal apa saja yang memerlukan perbaikan di masa depan.

TPAK dan Kesempatan Kerja

Tidak semua penduduk terjun ke pasar kerja untuk mencari pekerjaan. Secara teoritis, kelompok pertama yang dianggap tidak terjun ke pasar kerja adalah penduduk di luar usia kerja (di bawah 15 tahun). Kelompok kedua adalah mereka yang masuk usia kerja, tetapi dengan berbagai alasan tidak terjun ke pasar kerja. Yang termasuk dalam kelompok kedua ini adalah mereka yang tidak bekerja dan tidak berniat mencari pekerjaan (ibu rumah tangga, pelajar atau mahasiswa, orang sakit jiwa, dan kelompok apatis). Kedua kelompok tersebut termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Sementara itu, yang terjun ke dalam pasar kerja disebut dengan angkatan kerja yang terdiri atas penduduk yang bekerja dan pengangguran.

Tabel 4.1 berikut menyajikan penduduk usia kerja menurut kegiatan utama dan jenis kelamin. Berdasarkan tabel tersebut memberi gambaran bahwa angkatan kerja di kabupaten Nagekeo adalah sebesar 61,7 persen dari total penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) dan didominasi penduduk laki-laki. Sedangkan sebanyak 30,1 persen penduduk usia kerja yang masuk kategori bukan angkatan kerja dimana penduduk perempuan menempati posisi teratas.

Tabel 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	41 739	35 123	76 862
- Bekerja	40 881	33 696	74 577
- Menganggur	858	1 427	2 285
Bukan Angkatan Kerja	9 798	21 564	31 362
- Sekolah	4 418	4 319	8 737
- Mengurus Rumah Tangga	1 778	15 343	17 121
- Lainnya	3 602	1 902	5 504
Total	51 537	56 687	108 224

Sumber : BPS, SAKERNAS 2022

Dari sisi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki usia kerja yang bekerja lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, dimana perempuan kegiatan utamanya lebih fokus untuk mengurus rumah tangga dibandingkan laki-laki. Perbedaan ini terjadi karena dari sisi tradisi budaya, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah sedangkan perempuan mengurus rumah tangga. Kondisi di atas mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan besarnya keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Besar kecilnya TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain struktur umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Struktur umur mempengaruhi TPAK pada kelompok umur tertentu, demikian juga pendidikan. Status perkawinan mempengaruhi TPAK wanita, karena wanita dihadapkan pada pilihan antara bekerja atau mengurus rumah tangga setelah terikat perkawinan. Hal ini yang menjadi alasan mengapa lebih banyak perempuan masuk ke dalam pekerja tidak dibayar. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan TPAK jika pertumbuhan ekonomi bersumber dari sektor yang padat karya dibandingkan sektor yang padat modal.

Tabel 4.2 berikut menyajikan informasi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka dirinci menurut jenis kelamin di Kabupaten Nagekeo tahun 2022

Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nagekeo Menurut Jenis Kelamin, 2022

Jenis Kelamin	Partisipasi Angkatan Kerja	Pengangguran Terbuka
	2022	2022
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	80,99	2,06
Perempuan	61,96	4,06
Jumlah	71,02	2,97

Keterangan : Persentase terhadap total masing-masing jenis kelamin

Sumber : BPS, SAKERNAS 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Nagekeo pada tahun 2022 adalah 71,02 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) 71 diantaranya merupakan penduduk kategori angkatan kerja. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. TPAK laki-laki yang lebih tinggi ini dapat diakibatkan oleh pandangan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai tulang punggung keluarga sehingga harus mencari nafkah sedangkan perempuan mengurus rumah tangga.

Selain TPAK, indikator ketenagakerjaan penting lainnya adalah tingkat pengangguran. Dalam bahasan ini yang termasuk penganggur adalah mereka yang tergolong dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang pada saat pencacahan tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran seperti ini dikenal juga dengan istilah Pengangguran Terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka di Nagekeo sebesar 2,97 persen dari total angkatan kerja tahun 2022. Secara umum, angka pengangguran yang relatif rendah (di bawah 10 persen) tidak bisa dijadikan indikator bahwa tidak ada masalah dalam pasar kerja. Rendahnya tingkat pengangguran tersebut sangat berkaitan erat dengan konsep bekerja “minimal satu jam”. Selain itu, Kabupaten Nagekeo juga memiliki keragaman lapangan pekerjaan, sehingga cukup

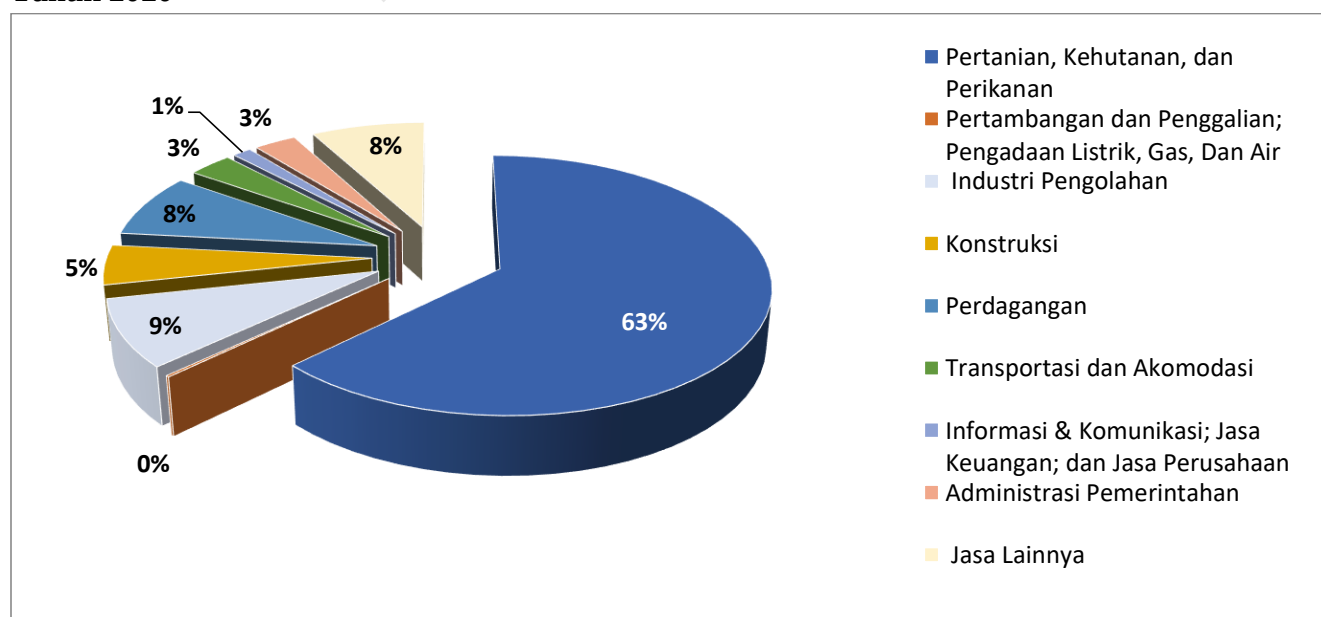
membantu penduduk untuk bekerja. Mereka yang tidak mempunyai kesempatan terserap di sektor formal masih bisa terserap dengan menerima pekerjaan di sektor informal.

Sektor Ketenagakerjaan

Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan (usaha) merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Menurut konsep, yang dimaksud dengan lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Lapangan usaha dikelompokkan menjadi 5 sektor dari 9 sektor yang terdapat dalam KBLUI 1990. Pengelompokan lapangan usaha ini berdasarkan empat sektor paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja dan satu sektor sebagai akumulasi lainnya. Lima sektor tersebut adalah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan, sektor industri, sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, dan sektor lainnya (sektor pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air minum; konstruksi, transportasi, pergudangan dan komunikasi, lembaga keuangan, *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan).

Gambar 4.1 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020



Sumber: BPS, Sakernas 2020

Gambar 4.1 memperlihatkan persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Tampak bahwa mayoritas penduduk Nagekeo bekerja pada sektor pertanian (termasuk perkebunan, perburuan dan perikanan) yaitu sebesar 63 persen. Hal ini disebabkan sektor pertanian umumnya merupakan sektor padat karya sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Sektor yang juga menyerap banyak tenaga kerja adalah sektor industri pengolahan utamanya industri mikro kecil. Sektor ini menyerap 9 persen tenaga kerja.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Kabupaten Nagekeo Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Pertanian	67,32	57,32
Manufaktur	12,91	14,48
Jasa	19,77	27,48

Keterangan : Persentase terhadap total masing-masing jenis kelamin

Sumber : BPS, Sakernas 2020

Jika ditinjau lebih jauh, berdasarkan jenis kelamin, maka terlihat penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan perempuan pada sektor pertanian, yaitu sebesar 67,32 persen. Dilihat menurut sektornya, perbedaan yang mencolok terjadi pada sektor manufaktur dan jasa, dimana persentase pekerja perempuan lebih besar dibanding pekerja laki-laki. Sebagai contoh hal ini tergambar dalam kondisi Kabupaten Nagekeo di sektor industri pengolahan tenun ikat dan anyaman bere, serta sektor jasa yang lebih banyak dikerjakan oleh kaum perempuan.

Status Pekerjaan

Status Pekerja adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Indikator status pekerja pada dasarnya dibagi dalam tujuh kategori yang berbeda tentang kelompok penduduk yang bekerja. Pertama, golongan yang berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain (status 1). Kedua, golongan yang berusaha dengan dibantu pekerja

tidak dibayar/pekerja keluarga atau buruh tidak tetap (status 2). Ketiga, golongan yang berusaha dengan dibantu pekerja dibayar atau buruh tetap (status 3). Keempat, buruh dan/atau karyawan (status 4). Kelima, pekerja bebas di pertanian (status 5). Keenam, pekerja bebas di nonpertanian (status 6). Ketujuh, pekerja keluarga/ pekerja tidak dibayar (status 7). Dalam perekonomian yang sedang berkembang, struktur pekerja menurut status seperti di atas juga mengalami pergeseran. Persentase pekerja yang termasuk status 1, 2, 5, 6 dan 7 (pekerja sektor informal) biasanya cenderung menurun, sementara pekerja status 3 dan 4 (sektor formal) meningkat.

Anwar dan Pungut (1992) menjelaskan proses pergeseran menurut status pekerjaan terjadi sejalan dengan kenaikan skala unit usaha dalam perekonomian. Dalam ekonomi yang sedang tumbuh, skala usaha biasanya mengalami kenaikan karena salah satu dari dua faktor berikut. *Pertama*, adanya kenaikan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa serta perbaikan sarana dan prasarana. Dengan kata lain, selama pertumbuhan ekonomi berlangsung, terjadi transformasi dalam bentuk peningkatan skala unit usaha yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya perubahan struktur ketenagakerjaan menurut status pekerjaan.

Lebih lanjut, Anwar dan Pungut (1992) menjelaskan kenaikan skala tiap-tiap unit usaha biasanya tercermin pada kenaikan rata-rata pekerja tiap unit usaha. Dengan demikian, kenaikan skala usaha tercermin antara lain dengan menurunnya persentase pekerja yang berusaha sendiri (status 1) di satu pihak dan meningkatnya persentase pekerja status 4 (buruh dan atau karyawan) dan status 7 (pekerja keluarga) di lain pihak. Selama perekonomian mengalami pertumbuhan secara berkesinambungan yang pada gilirannya menyebabkan skala usaha terus membesar, biasanya terjadi proses pergeseran pekerja dari status 2 menjadi status 3. Dengan kata lain, usaha-usaha yang hanya menggunakan pekerja keluarga atau buruh tidak tetap cenderung makin berkurang. Pergeseran dari status 2 menjadi status 3 ini membawa implikasi pada kenaikan persentase pekerja status 4.

Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Kabupaten Nagekeo yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2021

Status Pekerjaan	Jenis Kelamin		Total (%)
	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	24.94	21.39	23.35
Berusaha dibantu buruh/pekerja tidak tetap/pekerja tidak dibayar/keluarga	27.15	17.18	22.70
Berusaha dibantu buruh/pekerja tetap/pekerja dibayar	5.52	1.01	3.50
Buruh/karyawan	14.77	17.03	15.78
Pekerja bebas di pertanian dan non pertanian	7.63	2.49	5.33
Pekerja tidak dibayar/keluarga	19.98	40.91	29.33
Jumlah	100,00	100	100

Keterangan : Persentase terhadap total masing-masing jenis kelamin

Sumber : BPS, Sakernas 2021

Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat bahwa orang yang bekerja di Kabupaten Nagekeo pada tahun 2021 sebagian besar berstatus pekerjaan sebagai pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga, yaitu sebesar 29,33 persen dari total pekerja. Selain itu, persentase terbesar kedua sebesar 23,35 persen adalah berusaha sendiri.

Hal berikutnya yang menarik adalah jika dari gender terlihat bahwa penduduk perempuan yang berstatus pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga jauh lebih besar daripada penduduk laki-laki, yaitu sebesar 40,91 persen. Data ini menggambarkan bahwa inferioritas perempuan dalam keluarga dimana laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Hal ini yang menjadi alasan mengapa lebih banyak penduduk perempuan masuk ke dalam pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga (Wiyono 2002).

Indikator penting lainnya untuk melihat optimalisasi para pekerja dalam lapangan usaha yang dilakukannya adalah dengan melihat jumlah jam kerja keseluruhan para pekerja. Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa pada 2020, pekerja dengan jumlah jam kerja 1-19 jam per minggu (biasa dikategorikan sebagai pengangguran kritis) sebesar 25.762 orang atau 35.93 persen dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan porsi penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (< 35 jam seminggu) atau dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur

sebesar 49.397 orang atau 68,90 persen. Sementara itu penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (*full time worker*), yaitu pada kelompok 35 jam ke atas seminggu jumlahnya mencapai 22.294 orang atau 31,10 persen.

Tabel 4.5 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja di Kabupaten Nagekeo Menurut Jumlah Jam Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2020

Jumlah Jam Kerja	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Jumlah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
0 ^{*)}	...	...	3,38
1-19	...	...	35,93
20-34	...	...	29,59
35-54	...	...	28,94
55+	...	...	2,16
Jumlah	...	...	100

Keterangan : *) Sementara tidak bekerja
Persentase terhadap total masing-masing jenis kelamin

Sumber : BPS, SAKERNAS 2020

KEMISKINAN & POLA PENGELUARAN

5



**GARIS KEMISKINAN
TAHUN 2022**

RP 422.982



**JUMLAH PENDUDUK
MISKIN NAGEKEO
TAHUN 2022**

18.010 Jiwa



**PERSENTASE
PENGELUARAN RATA-RATA
PER KAPITA MENURUT
JENIS PENGELUARAN
TAHUN 2022**



MAKANAN

54,05 %



NON MAKANAN

45,95 %

**INDEKS P1
TAHUN 2022**

1,30



**INDEKS KEDALAMAN
KEMISKINAN (P1)**



Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan tingkat kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan



nagekeokab.bps.go.id



bps5318@bps.go.id



BPS Kabupaten
Nagekeo



@bpsnagekeo

BAB V

KEMISKINAN DAN POLA PENGELUARAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Namun, mengentaskan kemiskinan itu ternyata sama peliknya dengan mendata orang miskin yang ada di Indonesia termasuk di Kabupaten Nagekeo ini. Dengan perkataan lain, mencari data kemiskinan adalah sama rumitnya dengan mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Bahkan untuk menentukan kriteria tentang kemiskinan itu sendiri bukan persoalan yang mudah.

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Dalam kasus pengukuran kemiskinan (statistik kemiskinan), dilakukan kategorisasi yang membedakan keadaan 'miskin' dari 'kaya', penetapan tingkat-tingkat kemiskinan, dan acuan kemiskinan. Melalui upaya pengukuran kemiskinan ini, dapat dievaluasi ke arah mana perubahan masyarakat yang tengah terjadi sebagai dampak dari kebijakan publik yang ditujukan pada penanggulangan kemiskinan sebagai sasaran pembangunan. Bila ukuran-ukuran kemiskinan dapat dibakukan, dapat diperoleh keterbandingan capaian pembangunan antar daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan contoh ukuran pembangunan yang metode pengukurannya dibakukan secara internasional.

Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi penyebab kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kedua, dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural.

Kemiskinan absolut mencerminkan suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan

dan pendidikan. Kemiskinan absolut merujuk pada ketidakmampuan atau ketidakberdayaan seseorang untuk hidup secara layak. Kemiskinan absolut umumnya diukur dengan menggunakan garis kemiskinan yang konstan sepanjang waktu dalam bentuk jumlah maupun nilai pendapatan (uang). Namun pengukurannya juga dapat mengacu pada jumlah konsumsi kalori. Kriteria pengukuran seperti ini dikenal sebagai pendekatan biologis dan pendekatan kebutuhan dasar (Harmadi, 2007).

Pada konsep kemiskinan relatif, perhitungan kemiskinan didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Suatu kelompok masyarakat dianggap miskin relatif jika pendapatannya termasuk 30 persen terendah dari distribusi pendapatan. Dengan menggunakan kriteria ini, maka dapat dipastikan bahwa akan selalu ada penduduk miskin dalam suatu wilayah. Namun begitu dengan adanya asumsi pendapatan rata-rata masyarakat yang terus meningkat, maka garis kemiskinan juga terus meningkat. Di sini garis kemiskinan tidak menjadi fokus, karena lebih berorientasi pada upaya untuk memperkecil disparitas pendapatan antara mereka yang berada di bawah (miskin) dan mereka yang makmur (*better-off*). Meskipun demikian, sebenarnya ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan. Beberapa orang mengeluhkan bahwa mereka merasa terkucil dan rendah diri dalam pergaulan dengan orang yang "tidak miskin", meskipun secara absolut, sebenarnya orang tersebut tidak termasuk ke dalam kategori miskin.

Menurut pendekatan kemiskinan alamiah, timbulnya masalah kemiskinan lebih disebabkan karena keterbatasan individu maupun lingkungan. Dari sisi individu, kemiskinan dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya sifat malas, rendahnya keterampilan yang dimiliki, kurangnya kemampuan intelektual, keterbatasan fisik, dan rendahnya kemampuan untuk mengatasi masalah yang muncul di sekitarnya. Kemiskinan dari sisi individu secara sederhana dapat terjadi karena faktor-faktor biologis, psikologis dan kelemahan sosialisasi yang dimiliki oleh seorang individu miskin. Semua ketidakmampuan itu selanjutnya membuat seseorang akan sulit untuk melakukan usaha atau bekerja guna memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk perbaikan hidupnya.

Sementara itu, pendekatan kemiskinan alamiah yang melihat dari sisi lingkungan fisik beranggapan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh lingkungan fisik (alam) yang tidak mendukung. Beberapa contoh dari kondisi itu diantaranya: tanah yang tidak subur serta

topografi wilayah yang tidak menguntungkan, kepadatan penduduk yang melebihi daya dukung lingkungan alamnya, serta adanya kelangkaan sumber daya.

Secara sederhana dapat dikatakan, kemiskinan alamiah lebih banyak disebabkan rendahnya kualitas SDM, sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, bencana alam, dan lain-lain. Sementara itu, kemiskinan struktural yang biasa juga disebut dengan kemiskinan buatan. Baik langsung atau tidak, kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan tatanan kelembagaan dan aturan main yang diterapkan. Lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin (Samosir, 2004). Sistem sosial ekonomi yang berlaku memungkinkan terkonsentrasinya kekuasaan dan sumberdaya pada pihak tertentu yang berakibat terhambatnya peluang pihak lain untuk ikut mengakses. Contoh kondisi ini misalnya terlihat dari adanya ketimpangan atau kesenjangan antara desa dan kota, antar lapisan masyarakat, antar jenis kelamin, dan lain sebagainya.

Terminologi lain yang melekat dengan istilah kemiskinan adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut dapat dikurangi, dan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya yang menghalangi seseorang dalam melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik (Hidayat, 2007).

Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dapat tercapai adalah adanya kejelasan mengenai "kriteria" tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang termasuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Sedangkan syarat penting selanjutnya adalah memahami secara tepat apa yang menjadi penyebab kemiskinan di suatu komunitas.

Pilihan pada pendekatan rumah tangga untuk konsumsi didasari oleh kenyataan bahwa hampir mustahil di tengah kompleksitas jenis dan status pekerjaan sebagai sumber pendapatan, dan juga kejujuran semua pihak, untuk dapat menempuh pendekatan pendapatan secara langsung. Banyak studi di negara berkembang dan juga pengalaman empiris pengumpulan data kemiskinan melalui pendekatan pendapatan rumah tangga, ternyata sangat riskan dan senantiasa berhadapan dengan kebohongan, inkonsistensi, dan insufisiensi yang dalam bahasa statistik

disebut tidak memiliki reliabilitas yang cukup. Jalan satu-satunya saat ini, dan memang rasional, yaitu melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga yang merupakan proksi dari pendapatan.

Sumber data kemiskinan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 1) **Data Makro**, diperoleh dari pendataan secara sampel, yang selanjutnya dipakai sebagai angka perkiraan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dengan menggunakan penimbang. Sumber data makro adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Penggunaannya untuk target geografis dan indikator kinerja pemerintah. 2) **Data Mikro**, diperoleh dari hasil pendataan secara lengkap terhadap target sasaran keluarga/rumahtangga miskin. Data mikro ini diperoleh dengan mendata calon rumah tangga sasaran. Pendataan rumah tangga sasaran telah dilakukan sejak tahun 2005 melalui kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE), Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008), PPLS 2011 dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (Data Makro)

Sesuai dengan banyaknya dimensi dari kemiskinan, metodologi penghitungan penduduk miskin pun cukup banyak. Banyaknya penduduk miskin yang disajikan pada ulasan berikut adalah yang diperoleh dengan metode BPS. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan yang bersifat mendasar.

Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti: Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM) dari **penduduk referensi**, yaitu penduduk yang rentan untuk menjadi miskin. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari (sesuai dengan rekomendasi hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin. Sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber data utama yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul Konsumsi atau Susenas Konsumsi dan Pengeluaran. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung indikator kemiskinan pun berubah dari tahun ke tahun, sesuai dengan perkembangan harga.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan garis-garis kemiskinan tersebut di atas maka diperoleh jumlah penduduk miskin Kabupaten Nagekeo seperti yang disajikan pada Tabel 5.1. Dari tabel tersebut tampak bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagekeo dalam selang tahun 2018-2022 mengalami penurunan dari 12,98 persen menjadi 12,05 persen.

Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan pemerintah, baik di masa Orde Baru maupun di era reformasi, seperti pengembangan desa tertinggal, Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), beras rakyat miskin (Raskin), bantuan operasional sekolah (BOS), Askeskin, pembangunan perumahan rakyat, bantuan kredit mikro, Bantuan Tunai Bersyarat (BTB/PKH), dan sebagainya. Berbagai program tersebut tetap perlu dievaluasi baik sisi perencanaan dan pelaksanaannya agar dapat secara lebih signifikan lagi menurunkan tingkat kemiskinan.

Tabel 5.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Nagekeo 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kap/ bulan)	Jumlah penduduk Miskin (000 Jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2018	323 316	18,69	12,98
2019	328 646	18,70	12,82
2020	353 481	18,51	12,61
2021	386 027	19,11	11,76
2022	422 982	18,01	12,05

Sumber : BPS NTT, Kemiskinan 2018-2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan tingkat kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Agregasi dari tingkat kedalaman kemiskinan dapat dipergunakan sebagai anggaran minimal untuk meningkatkan pengeluaran penduduk miskin untuk mencapai garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Jika tingkat variasi pengeluaran di antara penduduk miskin semakin besar maka indeks ini akan semakin tinggi. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kabupaten Nagekeo, 2018–2022

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
(1)	(2)	(3)
2018	1,88	0,46
2019	1,93	0,42
2020	1,70	0,32
2021	1,73	0,32
2022	1,30	0,24

Sumber : BPS NTT, Kemiskinan 2018-2022

Apabila diperhatikan pada periode 2018-2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami fluktuasi ke arah penurunan. Penurunan nilai kedua indeks ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Penurunan kondisi kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya tiga indikator utama kemiskinan yakni persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang digambarkan pada tabel 5.1 dan tabel 5.2 di atas, menunjukkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Nagekeo perlahan-lahan mulai berubah. Tetapi masih perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam mengenai karakteristik kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Nagekeo. Tujuannya adalah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan dan cara mengatasinya.

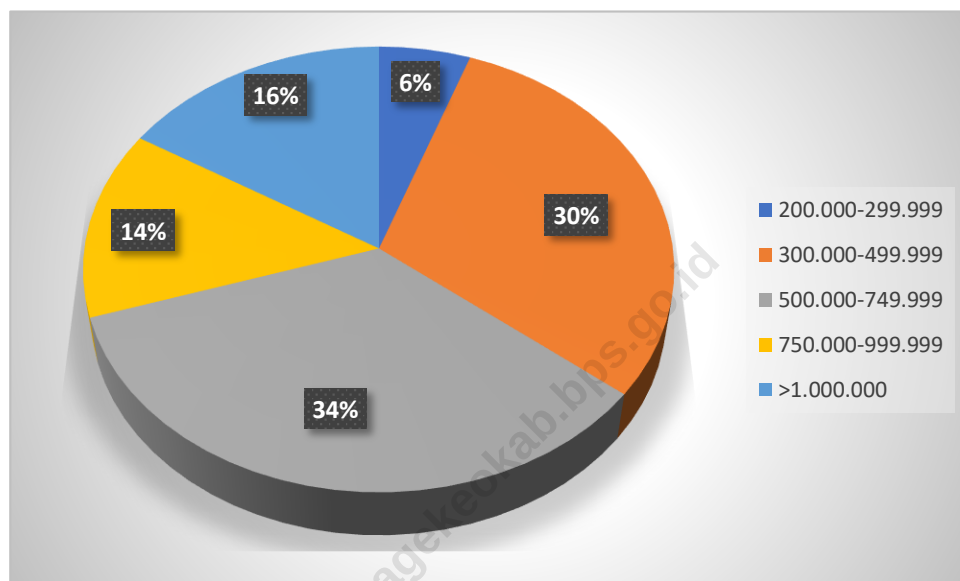
Pola Pengeluaran

Pengeluaran Rata-rata Per Kapita

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dengan jelas melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka pendekatan yang sering digunakan dalam setiap survei, termasuk Susenas, adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, data

pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Data pengeluaran perkapita penduduk Nagekeo tahun 2020 disajikan pada Gambar 5.1 berikut.

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Nagekeo Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan, 2022

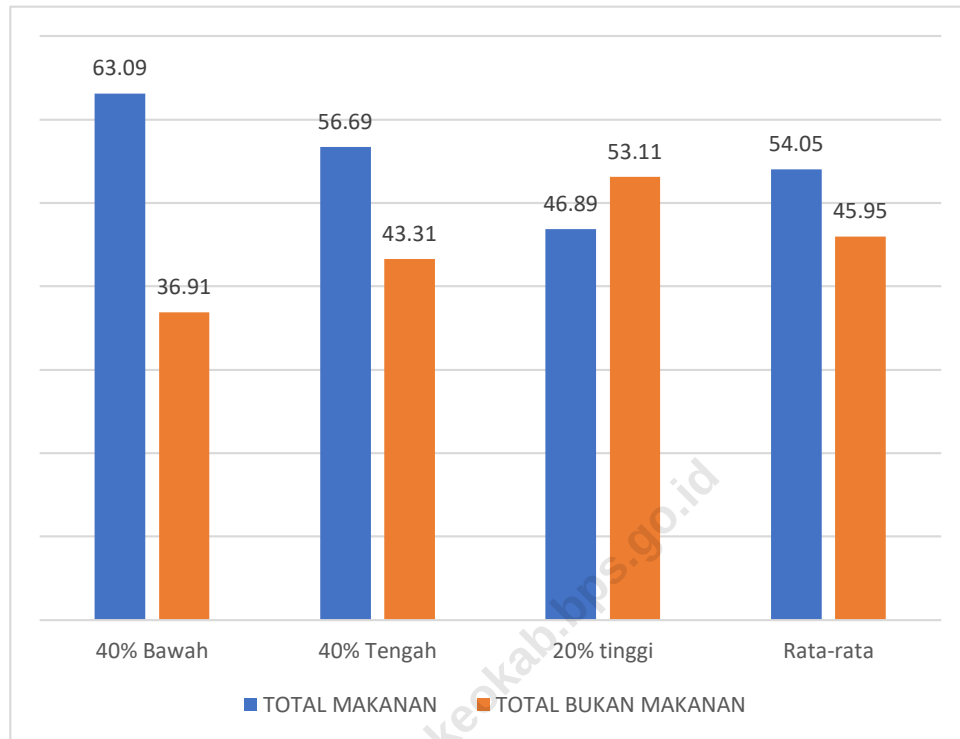


Sumber: BPS, SUSENAS 2022

Gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan sebagian besar penduduk Nagekeo adalah antara Rp 500.000-Rp 749.999, yaitu sebesar 34,43 persen. Sementara itu, penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan paling kecil adalah antara Rp 200.000-Rp 299.999 mencakup 5,48 persen.

Data konsumsi atau pengeluaran seperti yang disajikan di atas dapat dibedakan menurut pengeluaran untuk kelompok makanan dan kelompok bukan makanan. Tujuannya adalah untuk melihat tingkat kecukupan gizi khususnya kecukupan konsumsi kalori dan protein serta untuk melihat bagaimana penduduk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Menurut hukum Engle, jika pendapatan meningkat, maka proporsi pengeluaran terhadap bahan-bahan makanan akan semakin menurun. Dengan perkataan lain, semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan untuk makanan. Data persentase pengeluaran penduduk menurut jenis pengeluaran disajikan pada Gambar 5.2. di bawah ini.

Gambar 5.2 Persentase Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran Dan Jenis Pengeluaran Di Kabupaten Nagekeo, 2022

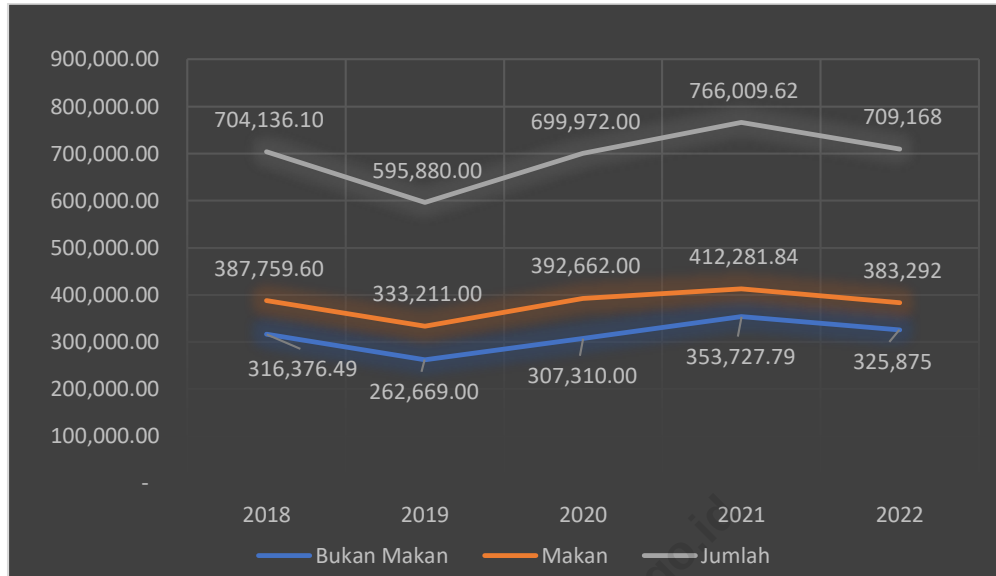


Sumber: BPS, SUSENAS 2022

Secara umum, Gambar 5.2 menginformasikan bahwa pengeluaran penduduk pada jenis kelompok makanan masih dominan dibandingkan pengeluaran kelompok bukan makanan, dimana pada tahun 2022 pada rata-rata pengeluaran perkapita 40 persen bawah persentasenya paling tinggi yaitu 63,09 persen dibandingkan golongan pengeluaran lainnya. Selain itu penduduk dengan golongan pengeluaran 20 persen tinggi proporsi pengeluaran untuk kelompok bukan makanan menempati persentase yang lebih tinggi yaitu sebesar 53,11 persen dibandingkan golongan pengeluaran lainnya. Dari kondisi ini menggambarkan pernyataan Hukum Engel, jika pendapatan meningkat, maka proporsi pengeluaran terhadap bahan-bahan makanan akan semakin menurun.

Persentase pengeluaran makanan dari suatu rumah tangga terhadap pengeluaran total mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga. Semakin tinggi persentasenya maka semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut.

Gambar 5.3 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Nagekeo, 2018-2022



Sumber: BPS, SUSENAS 2018-2022

Gambar 5.4 Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Nagekeo, 2018-2022



Sumber: SUSENAS, 2018-2022

Data rata-rata pengeluaran untuk konsumsi penduduk Kabupaten Nagekeo selama tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung lebih besar dibandingkan dengan kelompok bukan makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa

kesejahteraan rumah tangga atau penduduk di Kabupaten Nagekeo masih rendah (lihat Gambar 5.3 dan 5.4).

Pengeluaran Untuk Makanan

Besarnya pengeluaran untuk makanan relatif terhadap pengeluaran total mengindikasikan kemampuan ekonomi suatu rumah tangga. Tingginya persentase pengeluaran untuk makanan menunjukkan rendahnya pendapatan rumah tangga dan meningkatnya peluang rumah tangga tersebut masuk dalam kategori miskin. Jika proporsi pengeluaran makanan adalah yang tertinggi, proporsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar lainnya seperti pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan keamanan semakin menurun. Akibatnya, tingkat kesejahteraan rumah tangga secara umum juga menurun.

Tabel 5.3 Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Nagekeo (Persentase), 2016-2020

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
➤ Padi dan Umbi-umbian	16,05	16,68	14,53	14,85	13,69
➤ Sayuran dan buah	7,26	8,12	8,27	9,03	11,73
➤ Ikan, daging, telur, dan susu	9,67	9,05	9,45	10,06	9,04
➤ Makanan lainnya	22,06	22,17	22,81	21,98	21,64
➤ Perumahan	26,71	22,94	24,93	24,94	25,88
➤ Pakaian	2,28	2,15	2,17	2,29	2,32
➤ Non Makanan Lainnya	15,98	18,88	17,83	16,84	15,70
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, SUSENAS 2016-2020

Pengeluaran untuk makanan bergizi ditentukan berdasarkan jumlah pengeluaran untuk ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Tabel 5.3 menyajikan komposisi pengeluaran atau konsumsi penduduk Kabupaten Nagekeo per kapita per bulan tahun 2016-2020. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020 konsumsi terbesar kelompok pengeluaran untuk makanan adalah padi dan umbi-umbian sebesar 13,69 persen, sedangkan konsumsi sayuran dan buah serta ikan, daging, telur dan susu masih cukup rendah (11,73 persen dan 9,04 persen).

Pengeluaran Untuk Bukan Makanan

Pada Tabel 5.3 di atas juga tampak bahwa pada kelompok pengeluaran untuk bukan makanan, sebagian besar pengeluaran dalam kurun tahun 2016-2020 adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pada tahun 2020 terlihat pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga persentasenya paling tinggi yaitu sebesar 25,88 persen dari total pengeluaran konsumsi penduduk Nagekeo.

<https://nagekeokab.bps.go.id>

PERUMAHAN

6



Rumah tangga yang **memiliki fasilitas buang air besar sendiri** pada Tahun 2022

86,81 %

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Indikator yang secara langsung dapat memberikan gambaran tentang kebersihan lingkungan perumahan adalah fasilitas buang air besar



Rumah tangga yang sudah **menggunakan kloset leher angsa** Tahun 2022

94,60 %



Penduduk Kabupaten Nagekeo yang **sedang dan pernah** menggunakan **alat teknologi informasi** berupa **telepon seluler** ataupun **komputer** tahun 2022

78,90 %



nagekeokab.bps.go.id



bps5318@bps.go.id



BPS Kabupaten Nagekeo



@bpsnagekeo

BAB VI

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia selain sandang dan papan. Fungsi rumah tidak hanya sebagai tempat untuk tidur tetapi juga merupakan tempat untuk berlindung dari panas, hujan, dan ancaman keamanan. Kebutuhan rumah semakin lama semakin meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta semakin bertambahnya rumah tangga baru. Sementara itu, kemampuan daya beli setiap orang relatif kurang, walaupun untuk membeli rumah sederhana. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan perumahan yang difokuskan pada pembangunan perumahan yang sehat dan aman. Sehat dalam arti aman dari ancaman racun/polusi bahan bangunan yang digunakan. Aman mengandung pengertian fisik lingkungan sekeliling rumah, dalam arti tindak kejahatan serta akses ke fasilitas lainnya. Pelaksanaan pembangunannya kemudian dilakukan oleh pihak pengembang (Safiyati, 2002).

Kebersihan dan lingkungan rumah tinggal secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan anggota rumah tangga atau keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Indikator yang digunakan untuk menentukan indeks potensi keluarga sehat adalah pertama, tersedianya sarana air bersih; kedua, tersedianya jamban keluarga; ketiga, lantai rumah bukan dari tanah; keempat, peserta KB (bagi keluarga dengan PUS); kelima, memantau tumbuh kembang anak (bagi yang punya balita); keenam, menjadi peserta Dana Sehat/JPKM/Askes. Tiga indikator pertama, yaitu tersedianya sarana air bersih, jamban keluarga dan lantai bukan dari tanah merupakan indikator lingkungan yang semuanya berada di sekitar tempat tinggal (Sutji 2000).

Perilaku hidup sehat dan bersih merupakan salah satu program pemerintah yang harus dicapai. Oleh karena itu, harus dilihat bagaimana kondisi rumah tinggal di lingkungan yang sehat seperti yang ditentukan dalam indeks potensi keluarga sehat, dan bagaimana perilaku anggota rumah tangga yang berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Informasi tentang perumahan menjadi penting untuk melihat sejauh mana masyarakat telah menikmati rumah.

Kondisi Kualitas Rumah Tinggal

Kondisi dan kualitas rumah yang ditempati dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi dan kualitas rumah yang ditempati menunjukkan semakin baik keadaan sosial ekonomi rumah tangga.

Secara umum, kualitas rumah ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas rumah yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Tabel 6.1 Indikator Kondisi Rumah di Kabupaten Nagekeo, 2018 - 2020 (persen)

Indikator Kondisi Rumah	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
❖ Luas lantai kurang dari 10 m ²	33,11	36,04	35,20
❖ Lantai bambu/tanah/Lainnya	25,73	26,91	22,10
❖ Atap jerami/ijuk/daun/rumbia	0,73	1,45	0,38
❖ Dinding bilik (bukan tembok)	59,03	62,30	54,74
❖ Penerangan bukan listrik	7,99	11,98	4,05

Sumber :BPS, SUSENAS 2018-2020

Tabel 6.1 memperlihatkan persentase indikator kondisi rumah yang tidak sehat berdasarkan hasil SUSENAS, yang diperhatikan dari luas lantai rumah kurang dari 10 meter persegi, lantai terluas dari tanah, atap rumah terluas dari dedaunan, dinding rumah terbuat dari bilik (bukan tembok) dan penerangan tidak menggunakan listrik.

Salah satu kriteria rumah sehat dan nyaman adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai yang sesuai dengan jumlah penghuninya sehingga penghuninya tidak berdesakkan. Keadaan rumah tidak padat penghuni, menghindarkan rumah dari sarang tikus dan jentik nyamuk. Kondisi di dua tahun terakhir 2019-2020 terlihat kondisi rumah tidak sehat pada semua indikator persentasenya menurun.

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat menurut penggunaan jenis dinding pada rumah tempat tinggal. Rumah tangga di Kabupaten Nagekeo lebih banyak menggunakan dinding bukan tembok (kayu, anyaman bambu, batang kayu, bambu dan lainnya), persentasenya cukup tinggi yaitu sekitar di atas 50 persen. Pada tahun 2018-2020 sumber penerangan di Kabupaten Nagekeo yang menggunakan penerangan bukan listrik seperti pelita, obor, dan lain-lain, cenderung menurun.

Sumber Air Minum

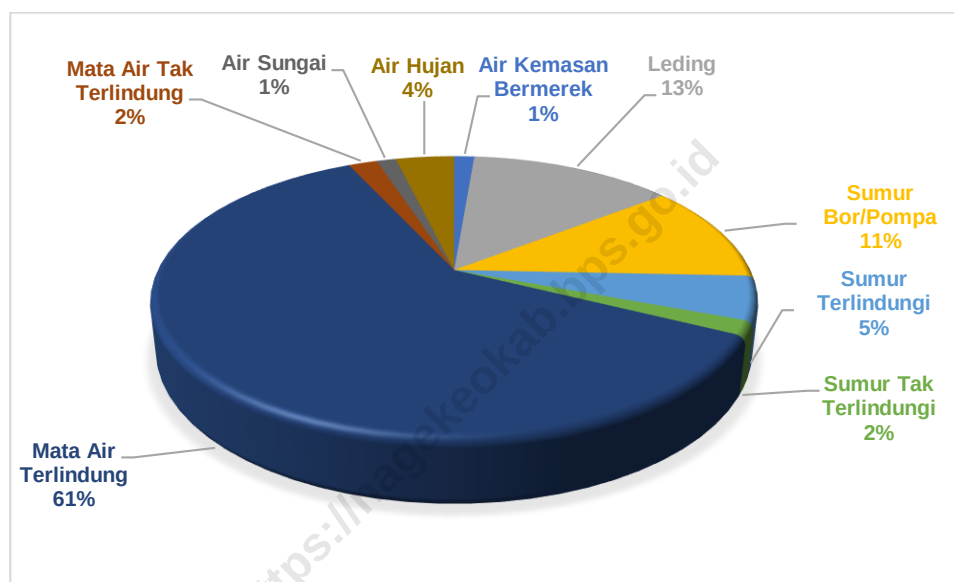
Air merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk yang harus dipenuhi. Jika air tidak ditangani dengan baik, maka penduduk akan merugi karena dapat kekurangan air atau bahkan kelebihan air yang berupa bencana banjir. Oleh karena itu, dalam upaya pemenuhan air penduduk berbagai aktivitas pembangunan harus selalu diselaraskan dengan penanganan lingkungan yang baik.

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun merupakan suatu tantangan bagi pemerintah dalam hal penyediaan air bersih. Masalah yang sudah ada belum terselesaikan yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan air, ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah penduduk. Hal penting lainnya, penduduk perlu air tidak hanya cukup dalam jumlah tapi juga air tersebut secara kualitas harus memenuhi syarat kesehatan.

Peningkatan akses air minum yang layak merupakan salah satu sasaran dari TPB yang juga tertuang dalam RPJMN 2015-2019 untuk mewujudkan universal akses air minum. Air minum yang layak (berkualitas) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan limbah atau sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tak terlindung. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022, rumah tangga di Kabupaten Nagekeo menggunakan air minum layak sebanyak 82,98 persen. Sedangkan rumah tangga yang mengkonsumsi air minum tidak layak adalah sebesar 17,02 persen yakni air yang bersumber dari air hujan atau air permukaan atau sumur dan mata air yang tidak terlindung, yang beresiko tercemar dan tidak sehat.

Selain sumber air minum yang digunakan, salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan akan air minum adalah akses terhadap air minum yang dapat dilihat dari penggunaan fasilitas air minum. Gambar 6.1 berikut menyajikan persentase rumah tangga di Kabupaten Nagekeo menurut penggunaan sumber air minum pada tahun 2022.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo Menurut Sumber Air Minum, 2022



Sumber: BPS, SUSENAS 2022

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa persentase terbesar air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Nagekeo adalah bersumber dari sumur terlindung dan mata air terlindung, yaitu sebesar 61 persen. Sedangkan sebanyak 13 persen penduduk Nagekeo mengonsumsi air minum yang berasal dari leding. Persentase terkecil yaitu mereka yang sumber air minum utamanya berasal air sungai dan air kemasan bermerek, yaitu hanya berada pada kisaran 1 persen.

Kebersihan Lingkungan

Masalah lingkungan masih merupakan masalah yang cukup besar khususnya di Kabupaten Nagekeo dan di Indonesia umumnya. Persoalan ini dapat diakibatkan oleh kesadaran akan lingkungan yang baik belum memadai, padahal kesadaran akan lingkungan yang sehat akan menjadi modal tersendiri di dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi ciri suatu penduduk yang beradab. Selama ini perbaikan lingkungan sering dilakukan karena anjuran pemerintah, yang berarti masyarakat belum sepenuhnya sadar bahwa perbaikan terhadap lingkungan itu merupakan suatu investasi menuju hidup yang lebih baik dan sehat di kemudian hari (Fadjri, 2000).

Kesadaran akan lingkungan secara keseluruhan berawal dari kondisi lingkungan kecil yaitu kondisi lingkungan rumah tangga. Banyak hal yang mempengaruhi belum munculnya kesadaran tersebut di antaranya tingkat pendidikan, kesadaran kesehatan dan pendapatan masyarakat itu sendiri yang belum mendukung. Indikator yang secara langsung dapat memberikan gambaran tentang kebersihan lingkungan perumahan antara lain adalah fasilitas buang air besar dan tempat pembuangan akhirnya.

Tabel 6.2 memperlihatkan tempat pembuangan air besar oleh anggota rumah tangga yang akan menentukan kemana perginya pembuangan air besar tersebut. Apakah terserap ke dalam tanah (misalnya lubang tanah) atau langsung disalurkan ke sungai atau pantai. Keduanya dapat menimbulkan pencemaran. Pencemaran ke dalam tanah, misalnya dapat mencemari sumber air tanah seperti sumur, mata air atau pompa jika jarak sumber air tanah ke pembuangan akhir tinja kurang dari 10 meter. Di lain pihak, pembuangan langsung ke saluran air atau sungai akan sangat mempercepat tercemarnya air sungai dan lingkungan. Pencemaran tersebut pada gilirannya akan merugikan kesehatan masyarakat itu sendiri.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2020-2022

Tempat Pembuangan Air Besar	2020	2021	2022
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
❖ Tangki septik	81,62	91,78	91,18
❖ Lainnya	18,38	8,22	8,82
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2019-2022

Seperti terlihat di Tabel 6.2 pada tahun 2022, tangki septik merupakan pilihan terbanyak yang digunakan oleh rumah tangga sebagai tempat pembuangan air besar. Hal tersebut memenuhi kriteria kesehatan lingkungan. Dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir tinja berada di angka 91,18 persen, sedangkan rumah tangga yang tidak menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir tinjanya sebanyak 8,82 persen saja. Tidak adanya rumah tangga yang mengaku membuang tinja ke pantai, tanah lapang, kebun, dan lainnya menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar.

Masih minimnya kondisi umum dari sistem air minum serta sanitasi di daerah ini, akan berdampak pada masalah tingkat kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sumber-sumber air minum dan sanitasi pada umumnya akan berakibat kepada munculnya penyakit seperti diare, muntaber dan berbagai penyakit kulit lainnya.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2020-2022

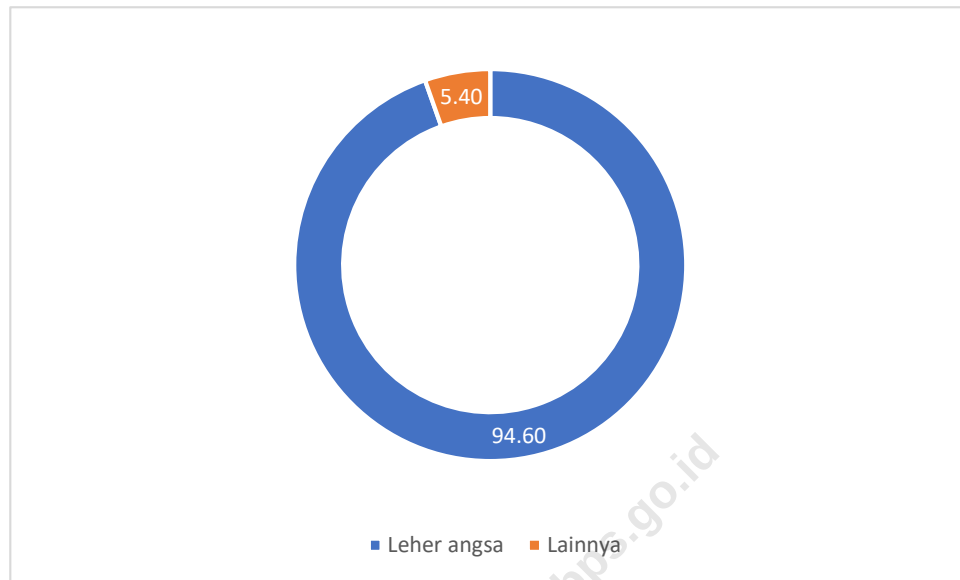
Fasilitas Buang Air Besar	2020	2021	2022
<i>(1)</i>	<i>(3)</i>	<i>(3)</i>	<i>(3)</i>
❖ Sendiri	88,45	87,57	86,81
❖ Lainnya	11,55	12,43	13,19
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2020-2022

Dari segi penggunaan fasilitas buang air besar, dalam tahun 2020-2022, persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas jamban sendiri mengalami penurunan dari 88,45 persen pada tahun 2020 menjadi 86,81 persen pada tahun 2022. Hal ini cukup buruk mengingat arti penting keberadaan jamban sendiri ini tidak saja berkaitan dengan pentingnya kesehatan penduduk, melainkan juga bisa mencerminkan kesadaran akan kebersihan lingkungan. Kesadaran mempunyai lingkungan yang bersih, lebih jauh mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang berpendidikan dan bermoral baik.

Tempat buang air besar suatu rumah tangga mempunyai hubungan (korelasi) dengan keadaan kesehatan anggota rumah tangganya dan masyarakat sekitarnya. Kloset leher angsa adalah tempat buang air besar yang baik ditinjau dari segi kesehatan lingkungan, karena saluran yang berbentuk “U” tersebut dimaksudkan untuk menampung air sehingga bau tinja tidak keluar.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Nagekeo yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut Jenis Kloset yang Digunakan, 2022



Sumber: BPS, Susenas 2022

Gambar 6.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Nagekeo sudah menggunakan kloset leher angsa, yaitu mencapai 94,6 persen dan sisanya masih menggunakan kloset plengsengan serta kloset cemplung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengerti akan pentingnya kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

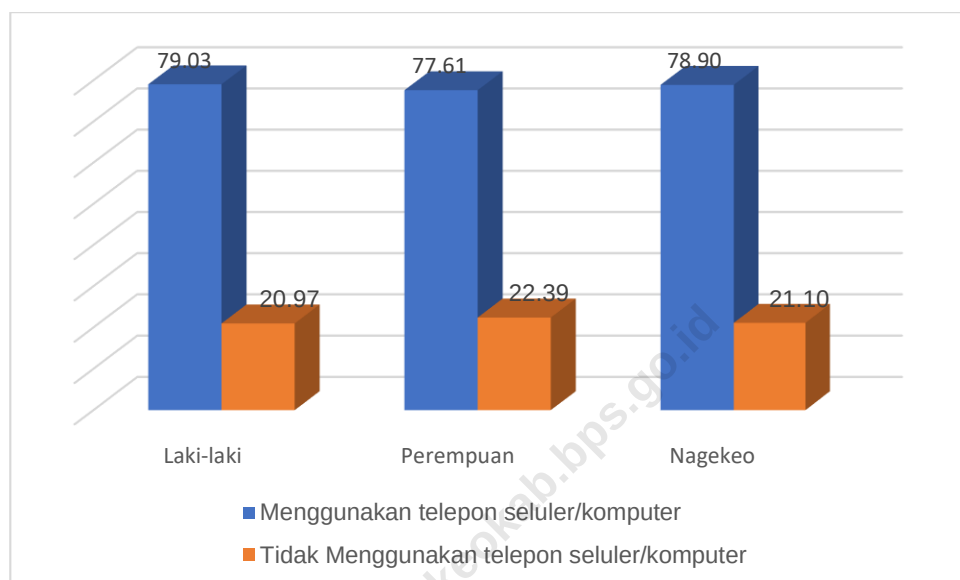
Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi

Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon selular (*handphone/HP*) menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Hal ini menjadikan kepemilikan telepon seluler (HP)/nirkabel sangat penting karena merupakan fasilitas yang dapat digunakan di rumah tangga sebagai alat komunikasi.

Saat ini, kepemilikan telepon seluler (HP)/nirkabel sudah menjadi hal yang umum bagi masyarakat. Dengan harga yang semakin terjangkau dan bermacam pilihan, telepon seluler

(HP)/nirkabel sangat diminati oleh masyarakat. Bentuk telepon seluler yang praktis dan mudah dibawa sehingga memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi.

Gambar 6.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Penggunaan Teknologi Informasi, 2022



Sumber: BPS, SUSENAS 2022

Sebanyak 78,90 persen penduduk Kabupaten Nagekeo sedang dan pernah menggunakan alat teknologi informasi berupa telepon seluler ataupun komputer; baik milik pribadi, keluarga, maupun fasilitas teknologi informasi umum. Tingginya penduduk yang menggunakan alat teknologi informasi berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan daya beli masyarakat, yang merupakan indikasi yang positif bagi perkembangan suatu daerah.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

7



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



IPM TAHUN 2023
KABUPATEN NAGEKEO

67,07

UMUR HARAPAN HIDUP (UHH)
TAHUN 2023

67,91

Rata-rata anak yang lahir hidup pada tahun 2023 akan terus hidup hingga mencapai umur 67 sampai 68 tahun



PENGELUARAN RIIL PER KAPITA
TAHUN 2023

RP 8.706.000

Tiap anggota keluarga dalam rumah tangga melakukan pengeluaran baik untuk konsumsi maupun non konsumsi sebesar 8,7 juta



nagekeokab.bps.go.id



bps5318@bps.go.id



BPS Kabupaten
Nagekeo



@bpsnagekeo

BAB VII

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia mempunyai kemampuan di berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, berpengetahuan, dan memiliki kehidupan yang layak. Masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; serta kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam suatu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*.

Indeks pembangunan manusia (IPM) juga merupakan salah satu indikator yang secara tidak langsung digunakan untuk melihat besarnya keberhasilan layanan yang telah dilaksanakan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat pemerintahan di daerah. Karena itu, suatu daerah bisa dikatakan berhasil dalam pembangunan manusianya apabila pembangunannya diarahkan atau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan sekaligus meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Meningkatnya pencapaian IPM bisa diartikan secara sederhana yaitu meningkatnya satu atau lebih komponen IPM yang meliputi komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Sasarannya jelas yaitu masyarakat dapat menikmati pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang merupakan rata-rata dari indeks kesehatan, pengetahuan dan indeks pengeluaran/daya beli. Metode penghitungan IPM di Indonesia telah mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada dimensi pengetahuan, perubahan proksi indikator daya beli dan agregasi perhitungan IPM. Indikator dalam dimensi pengetahuan yang sebelumnya digunakan yakni angka melek huruf diganti

dengan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling/EYS*) sedangkan rata-rata lama sekolah (*Means Years of Schooling/MYS*) tetap digunakan. Pergantian ini perlu karena angka melek huruf tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik dan karena angka melek huruf sebagian daerah sudah sangat tinggi. Sementara itu, dalam perhitungan indikator daya beli, metode baru menggunakan 96 komoditas sedangkan pada metode lama 27 komoditas. Pertimbangan perubahan adalah *share* komoditas metode lama terus mengalami penurunan. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada metode agregasi perhitungan IPM. Metode yang digunakan sebelumnya adalah rata-rata aritmatik diganti dengan dengan rata-rata geometrik sehingga capaian rendah pada suatu komponen tidak ditutupi oleh capaian yang tinggi pada komponen lain.

Dalam menganalisis tingkat pembangunan menggunakan IPM umumnya dikenal empat kategori capaian pembangunan manusia. Empat kategori tersebut meliputi IPM rendah ($IPM < 60$), IPM sedang ($60 \leq IPM < 70$), IPM tinggi ($70 \leq IPM < 80$), dan IPM sangat tinggi ($IPM \geq 80$).

Berikut adalah gambaran IPM dan komponen-komponen penyusun IPM Kabupaten Nagekeo tahun 2015-2020.

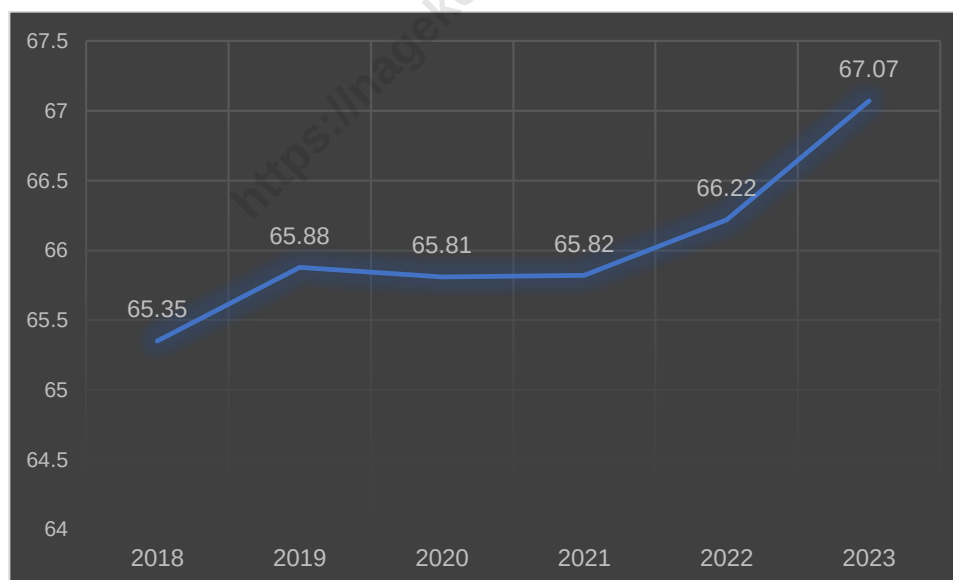
Perkembangan IPM Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023

Pencapaian pembangunan manusia di Nagekeo dan kabupaten lain di daratan Flores disajikan pada Tabel 7.1. Selama periode 2018-2023, pencapaian angka IPM Kabupaten Nagekeo relatif terus membaik. Selama kurun waktu lima tahun pembangunan, terhitung dari 2018 hingga 2023, Kabupaten Nagekeo telah mengalami peningkatan IPM sebesar 1,72 poin atau meningkat dari 65,35 pada tahun 2018 menjadi 67,07 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain sebaratan Flores, dalam periode 2018-2023 IPM Nagekeo merupakan yang tertinggi keempat setelah Ngada dan Ende serta memiliki nilai IPM di atas Provinsi NTT. Meskipun demikian, pemerintah dan masyarakat bersama-sama perlu meningkatkan upaya percepatan pembangunan manusia karena hingga tahun 2023, tingkat pembangunan manusia di kabupaten ini masih dalam kategori sedang.

Tabel 7.1 Indeks Pembangunan Manusia Sedaratan Flores, 2018-2023

	Indeks Pembangunan Manusia						Peringkat IPM
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nusa Tenggara Timur	64,39	79,55	65,19	65,28	65,90	66,68	
Flores Timur	63,55	64,34	64,22	64,22	64,93	65,79	11
Sikka	63,89	64,75	65,11	65,41	66,06	66,89	6
Ende	66,62	67,20	67,04	67,30	67,97	68,63	3
Ngada	67,10	67,76	67,88	67,88	68,26	69,14	2
Manggarai	63,32	64,15	64,54	65,01	65,83	66,42	7
Manggarai Barat	62,58	63,50	63,89	64,17	64,92	65,81	10
Nagekeo	65,35	65,88	65,81	65,82	66,22	67,07	4
Manggarai Timur	59,49	60,47	60,85	61,37	62,30	63,24	19

Sumber: BPS NTT, IPM 2023

Gambar 7.1 Perkembangan Peningkatan IPM Kabupaten Nagekeo 2018-2023

Sumber: Hasil pengolahan data IPM 2018-2023

Dari sisi perkembangan IPM seperti yang disajikan pada Gambar 7.1 di atas dapat diketahui bahwa IPM di Nagekeo terus mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam periode 2018-2023 dan memiliki kecenderungan meningkat, kecuali pada periode 2019-2020.

Namun, meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia daerah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, besarnya kenaikan indeks tersebut malah menurun dari waktu ke waktu. Kondisi ini mengindikasikan perubahan yang semakin lambat dalam pembangunan manusia. Untuk itu, upaya peningkatan kesejahteraan hidup melalui pendidikan, kesehatan dan pengeluaran baik makanan dan bukan makanan perlu terus ditingkatkan.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu diukur dari waktu ke waktu. Untuk mengukur kecepatan perkembangan (perubahan) pembangunan manusia (tingkat kemajuan IPM) digunakan rumus reduksi *shortfall* per tahun (*annual reduction shortfall*). Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM = 100). Semakin besar reduksi *shortfall* (r) di suatu wilayah menunjukkan semakin besar kemampuan yang dicapai dalam periode tertentu. Kecepatan pencapaian (r), terbagi dalam 4 (empat) tingkatan yaitu sangat lambat ($r < 1,30$), lambat ($1,30 \leq r \leq 1,50$), menengah ($1,50 < r < 1,70$), dan cepat ($r \geq 1,70$).

Pola perkembangan IPM selama periode 2015-2020 menunjukkan adanya fluktuasi jarak IPM terhadap nilai idealnya (100) yang direpresentasikan dengan ukuran reduksi *shortfall*. Seperti terlihat pada tabel 7.2, reduksi *shortfall* secara umum terus mengalami peningkatan dari kategori lambat menjadi cepat. Kondisi ini sejalan dengan tingkat perkembangan IPM yang terus naik seperti yang disajikan pada Gambar 7.1 di atas. Nilai reduksi *shortfall* yang semakin besar ini mengandung arti proporsi pencapaian pembangunan manusia (IPM) yang terjadi pada suatu tahun semakin besar jika dibandingkan dengan nilai IPM ideal yang harus dicapai.

Pada tahun 2023 baik nilai IPM secara absolut dan secara reduksi *shortfall* mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan reduksi *shortfall* yang bernilai positif.

Hal ini tidak terlepas dengan adanya upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terus berupaya untuk memperbaiki struktur ekonomi pasca pandemi tahun 2023 yang sangat berpengaruh terhadap segala bidang serta dialami oleh semua daerah. Dimensi utama yang meningkatkan indeks IPM Nagekeo yaitu dimensi standar hidup layak yang ditunjukkan di penjelasan bagian bawah.

Tabel 7.2 Hasil Perhitungan Reduksi *Shortfall* IPM Kabupaten Nagekeo

Basis Data Tahun (t)	IPM t	IPM t+n	IPM Ideal	Reduksi <i>Shortfall</i> (r)	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016-2017	63,93	64,74	100	2,24	Cepat
2017-2018	64,74	65,35	100	1,73	Cepat
2018-2019	65,35	65,88	100	1,53	Menengah
2019-2020	65,88	65,81	100	-0,26	Sangat Lambat
2020-2021	65,81	65,82	100	0,03	Sangat Lambat
2021-2022	65,82	66,22	100	1,17	Lambat
2022-2023	66,22	67,07	100	2,52	Cepat

Sumber: Hasil pengolahan data IPM 2016-2023

Untuk melihat lebih jauh hasil yang telah dicapai pada proses pembangunan manusia di Kabupaten Nagekeo, perlu kiranya kita telaah satu per satu kemajuan yang didapat untuk masing-masing dimensi dan indikatornya.

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Salah satu dimensi dalam penyusunan angka IPM adalah umur panjang dan hidup sehat. Indikator dimensi ini adalah Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Semakin tinggi UHH, memberikan indikasi semakin tinggi derajat kesehatan suatu masyarakat.

Tabel 7.3 berikut menunjukkan bahwa UHH Kabupaten Nagekeo berkisar antara 66,62 sampai 67,91 tahun. Pada tahun 2023 UHH 67,91 tahun misalnya mengandung arti rata-rata anak yang lahir hidup pada tahun 2023 akan hidup sampai berusia 67,91 tahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya sedaratan Flores maka UHH kabupaten Nagekeo masih lebih rendah dari kabupaten Ngada dan Manggarai Timur serta masih jauh juga dari angka harapan hidup maksimum yang ditetapkan untuk Indonesia saat ini yakni 85 tahun. Selain itu, peningkatan UHH sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 juga dapat dikatakan kurang signifikan karena dalam kurun waktu enam tahun tersebut usia harapan hidup hanya

bertambah 1,29 tahun. Untuk itu, upaya yang bersifat komprehensif dan lintas sektor perlu ditingkatkan, agar perbaikan derajat kesehatan yang direfleksikan secara nyata melalui penurunan angka kematian bayi secara baik dapat terwujud di masa mendatang.

Tabel 7.3 Umur Harapan Hidup Sedaratan Flores, 2018-2023

Prov/Kab	Umur Harapan Hidup (UHH)						Perubahan 2018-2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nusa Tenggara Timur	66,38	66,85	67,01	67,15	67,47	67,77	1,39
Flores Timur	64,70	65,10	65,20	65,20	65,31	65,96	1,26
Sikka	66,61	67,07	67,24	67,24	67,45	68,30	1,69
Ende	64,75	65,17	65,29	65,29	65,43	66,12	1,37
Ngada	67,59	67,96	68,04	68,04	68,12	68,71	1,12
Manggarai	66,23	66,77	67,03	67,03	67,11	67,63	1,40
Manggarai Barat	66,58	67,12	67,38	67,38	67,46	68,00	1,42
Nagekeo	66,62	67,03	67,13	67,13	67,25	67,91	1,29
Manggarai Timur	67,62	67,98	68,04	68,04	68,07	68,49	0,87

Sumber: BPS NTT, IPM 2018-2023

Untuk menuju masyarakat berumur panjang dan hidup sehat kiranya program-program yang berkaitan dengan upaya mempermudah akses dan peluang masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan. Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan, upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan balita secara bertahap harus terus menjadi prioritas, begitu pula penanganan status gizi pada balita dari waktu ke waktu agar terus ditingkatkan, dengan tidak mengabaikan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kesehatan. Selain berpengaruh pada pencapaian derajat kesehatan, faktor kurangnya gizi juga menyebabkan anak terperangkap dalam keterbatasan perkembangan otaknya yang berakibat sulit untuk mengikuti pelajaran dengan baik.

Tingkat kesehatan balita secara nyata juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibu serta lingkungannya. Tidak sedikit anak yang terpaksa lahir dengan berat badan lahir rendah karena dilahirkan oleh ibu yang menderita kekurangan gizi. Dimana anak-anak yang mengalami

kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius sebab mereka terancam untuk mengalami tumbuh kembang yang lambat serta kecerdasan rendah. Anak-anak yang berpotensi mengalami hal tersebut utamanya berasal dari keluarga tidak mampu.

Dimensi Pengetahuan

Indikator yang digunakan dalam dimensi pengetahuan adalah harapan lama sekolah/HLS (*expected years of schooling/EYS*) dan rata-rata lama sekolah/RLS (*mean years of schooling/MYS*). Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia tujuh tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Pembangunan di bidang pendidikan akan membawa dampak positif cukup nyata di masa mendatang. Peningkatan partisipasi pendidikan dan penurunan angka rawan putus sekolah tampaknya harus terus digalakkan dan menjadi prioritas utama dengan diiringi pembangunan serta revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Sebab dengan komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda diperlukan persiapan sarana penunjang pendidikan yang memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 10-14 tahun yang masih relatif besar.

Pencapaian tingkat pendidikan yang cukup baik saat ini merupakan cermin dari keberhasilan perencanaan pembangunan di masa lalu. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memelihara upaya-upaya positif yang telah dirintis serta lebih mempertajam sehingga dapat dihasilkan capaian yang secara nyata lebih baik dari yang dirasakan saat ini.

Tabel 7.4 Angka Harapan Lama Sekolah Sedaratan Flores, 2018-2023

Prov/Kab	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)						Perubahan 2018-2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nusa Tenggara Timur	13,10	13,15	13,15	13,20	13,21	13,22	0,12
Flores Timur	12,89	12,90	12,90	12,92	12,94	12,95	0,06
Sikka	12,70	12,87	12,87	13,43	13,44	13,66	0,96
Ende	13,76	13,77	13,77	13,79	13,81	13,82	0,06
Ngada	12,68	12,69	12,69	12,71	12,73	12,74	0,06
Manggarai	12,71	13,14	13,14	13,69	13,70	13,71	1
Manggarai Barat	11,55	11,96	11,96	12,29	12,31	12,53	0,98
Nagekeo	12,46	12,47	12,47	12,49	12,51	12,59	0,13
Manggarai Timur	11,34	11,69	11,69	12,26	12,30	12,59	1,25

Sumber: BPS NTT, IPM 2018-2023

Seperti yang disajikan pada Tabel 7.4 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) kabupaten Nagekeo berkisar antara 12,46 tahun hingga 12,59 tahun. Pada tahun 2023, HLS Kabupaten Nagekeo mencapai 12,59 tahun meningkat dari tahun sebelumnya yang berarti lamanya pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu adalah 12,59 tahun. Angka ini juga melewati lamanya masa wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah. Meskipun demikian, masa pendidikan 12,59 tahun tersebut jika disesuaikan dengan jenjang pendidikan masih belum cukup untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain sedaratan Flores, maka angka harapan lama sekolah di Nagekeo secara umum masih lebih rendah dari HLS Kabupaten Ende dan Manggarai. Selain itu, HLS Kabupaten Nagekeo juga lebih rendah dari HLS tingkat Provinsi NTT dengan tingkat perubahan dalam lima tahun terakhir sejak 2018 sampai 2023 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan perubahan di Kabupaten Sikka, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Menghadapi kondisi seperti di atas pemerintah dan segenap masyarakat perlu mendorong partisipasi sekolah anak-anak usia sekolah, menekan tingkat putus sekolah, memudahkan akses ke sekolah baik dari sisi keterjangkauan biaya pendidikan, lokasi sekolah dan akses terhadap sarana penunjang pendidikan.

Indikator berikutnya adalah dimensi pengetahuan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS/MYS), RLS merupakan kombinasi dari angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi nilai indikator ini dapat diartikan sebagai semakin tinggi jenjang pendidikan yang pernah atau sedang dijalani. Angka rata-rata lama sekolah disajikan pada Tabel 7.5 berikut,

Tabel 7.5 Rata-rata Lama Sekolah Sedaratan Flores, 2018-2023

Prov/Kab	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)						Perubahan 2018-2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nusa Tenggara Timur	7,30	7,55	7,63	7,69	7,70	7,82	0.52
Flores Timur	7,42	7,70	7,71	7,72	7,79	8,04	0.62
Sikka	6,69	6,71	6,94	6,95	6,96	6,98	0.29
Ende	7,79	7,80	7,81	8,03	8,09	8,20	0.41
Ngada	8,07	8,37	8,52	8,53	8,54	8,82	0.75
Manggarai	7,26	7,27	7,37	7,61	7,62	7,63	0.37
Manggarai Barat	7,18	7,19	7,30	7,56	7,80	7,94	0.76
Nagekeo	7,82	7,83	7,89	7,90	7,91	8,14	0.32
Manggarai Timur	6,65	6,87	7,08	7,35	7,42	7,70	1.05

Sumber: BPS NTT, IPM 2018-2023

Pencapaian rata-rata lama sekolah (RLS) di Nagekeo berada pada rentang 7,82 tahun hingga 8,14 tahun dalam periode 2018-2023. Angka rata-rata lama sekolah ini sudah hampir mendekati target dari program pendidikan wajib belajar yaitu 9 tahun dimana diharapkan penduduk Indonesia minimal dapat menamatkan pendidikan sampai tingkat SMP sehingga dengan melihat angka RLS sebesar 8,14 tahun pada tahun 2023 berarti penduduk Kabupaten Nagekeo rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Nagekeo juga masih lebih rendah dibandingkan RLS Kabupaten Ngada. Meskipun demikian, peningkatan RLS Nagekeo dalam kurun tahun 2018-2023 merupakan yang terendah diatas Sikka dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Flores yakni 0,32 tahun. Hal tersebut dapat menjadi pertanda

buruk mengingat angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah maksimum yang diharapkan yakni 15 tahun.

Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih cukup besarnya penduduk dewasa di Kabupaten Nagekeo yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar maupun yang tidak sekolah, sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk usia muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terasa hasilnya secara nyata. Perlu kiranya disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, khususnya bagi mereka yang telah putus sekolah sejak kurun waktu 5-10 tahun yang lalu. Program pendidikan dasar 9 tahun seyogyanya juga diupayakan lebih serius bagi penduduk putus sekolah yang belum mengenyam pendidikan dasar maupun menengah pertama meskipun usianya telah beranjak dewasa. Terutama pada masyarakat perdesaan, pendidikan masih dipandang sebagai barang mahal, akibat dari kemampuan ekonomi keluarga yang terbatas. Utamanya di daerah perdesaan, meskipun sudah adanya program pembebasan biaya sekolah, keterbatasan kondisi ekonomi keluarga berdampak pada dorongan kuat untuk segera terjun ke dunia kerja dan meninggalkan bangku sekolah. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) seperti, program Paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional untuk yang putus sekolah pada usia 15 tahun ke atas.

Selain yang telah dikemukakan di atas, pembebasan biaya pendidikan oleh pemerintah harus dikawal dengan penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai. Yang patut diperhatikan, biaya pendidikan bukan hanya biaya SPP saja, diluar itu orang tua harus mengeluarkan biaya untuk transportasi anak ke sekolah, keperluan untuk baju seragam, buku dan lain sebagainya. Terutama golongan masyarakat yang kurang mampu, kebijakan alokasi dana pendidikan yang mencapai 20 persen diharapkan dapat memberi jalan keluar untuk permasalahan ini.

Dimensi Standar Hidup yang Layak

Dimensi standar hidup yang layak didekati dengan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat yang didekati dengan kebutuhan standar minimal untuk dapat hidup layak

(*Purchasing Power Parity – PPP dalam rupiah*). Kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity – PPP*) disajikan pada tabel 7.6 berikut,

Tabel 7.6 Rata-rata Pengeluaran Riil Per Kapita Sedaratan Flores, 2018-2023

Prov/Kab	Pengeluaran Riil Perkapita (Ribu Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nusa Tenggara Timur	7 566	7 769	7 598	7 554	7 877	8 248
Flores Timur	7 573	7 770	7 631	7 578	7 918	8 223
Sikka	7 958	8 313	8 081	8 021	8 362	8 678
Ende	8 995	9 315	9 094	9 027	9 413	9 739
Ngada	8 857	8 961	8 865	8 819	8 997	9 350
Manggarai	7 175	7 276	7 203	7 133	7 580	7 903
Manggarai Barat	7 426	7 602	7 468	7 410	7 636	7 913
Nagekeo	8 219	8 469	8 309	8 254	8 433	8 706
Manggarai Timur	5 809	5 919	5 818	5 780	6 145	6 276

Sumber : BPS NTT, IPM 2018-2023

Pengeluaran riil perkapita masyarakat Nagekeo pada tahun 2023 sekitar Rp 8,7 juta. Dibandingkan dengan tahun 2018, besaran pengeluaran ini telah meningkat sebesar Rp 487 ribu atau meningkat sebesar 5,93 persen, Dalam kurun tahun 2018-2023, pengeluaran riil perkapita masyarakat Nagekeo masih lebih tinggi dibandingkan pengeluaran riil perkapita di tingkat Provinsi NTT dan masih lebih tinggi dari beberapa kabupaten lain sedaratan Flores selain Ende dan Ngada.

Pengeluaran riil perkapita juga menggambarkan daya beli masyarakat yang sangat ditentukan oleh kemampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Semakin mudah masyarakat untuk memperoleh pendapatan maka semakin meningkat daya belinya. Dengan pendapatan yang lebih baik maka kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan keluarga dapat tercapai. Demikian pula sebaliknya.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, upaya pembangunan di sektor perdagangan khususnya pada usaha skala mikro dan usaha kecil menengah (UMKM) merupakan alternatif yang perlu juga untuk dilakukan. Semisal, membantu permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM seperti rendahnya akses permodalan, kesinambungan pasokan bahan baku, lemahnya posisi tawar sehingga menekan harga jual, kualitas produk rendah, rendahnya akses informasi pasar, dan rendahnya daya saing. Pengembangan ekonomi perlu juga memperhatikan basis potensi kecamatan dan desa. Pembangunan berbasis karakter daerah setempat bukan hanya akan membawa kemajuan kepada daerah tersebut, tetapi lebih jauh merupakan pertahanan sosial yang cukup kuat dikala krisis.

Bila dilihat lebih dalam, seperti yang telah dipublikasikan sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat golongan miskin di Kabupaten Nagekeo bekerja pada sektor pertanian dan di sektor informal. Ini artinya bahwa dengan melakukan intensifikasi pembangunan di sektor pertanian dan sektor perdagangan atau UMKM (sektor informal), terutama program pemberdayaan pada usaha mikro untuk rumah tangga miskin, maka sesungguhnya secara otomatis akan memberikan kontribusi positif pada penurunan angka kemiskinan.

Kenyataan bahwa tingkat pendidikan yang rendah hendaknya disikapi dengan memberikan perluasan lapangan usaha yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Inovasi usaha di bidang pertanian, pariwisata dan jasa dengan memanfaatkan potensi alam Kabupaten Nagekeo harus terus-menerus dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moh. Arsjad dan Udi Hade Pungut. 1992. “ Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Struktur Tenaga Kerja Antar Wilayah di Indonesia, 1971 - 1990 “. Dalam Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Asamanedi, Drs.1999.”Persepsi Remaja Mengenai Perkawinan Menuju Reproduksi Sehat”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-29, No.4,1999. Jakarta: Lembaga Demogrfi FE-UI.
- Bagian Analisis dan Pengembangan Statistik Kependudukan. 2000. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 1999*. Jakarta : BPS.
- Bagian Analisis Statistik Sosial.1993. *Analisis Perkembangan Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia 1983-1991*. Jakarta : BPS.
- BPS, BAPPENAS dan UNDP. 2001. *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001*. Jakarta: BPS, BAPPENAS dan UNDP.
- Brodjonegoro, Bambang P.S, Dr. 2000. “ Pemulihan Ekonomi, Otonomi Daerah Dan Kesempatan Kerja Di Indonesia “. Dalam Warta Demografi Tahun ke-30, No.3, 2000. Jakarta : Lembaga Demografi FE - UI.
- Chotib. 2007. “ Menyiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas Menyambut ”Jendela Kesempatan”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-37, No.1, 2007. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Cicih, Lilis Heri Mis, Ir., Msi. 2001. “ Menghindari Lost Generation Melalui Perbaikan Gizi Anak Balita”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-31, No.4, 2001. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Fadjri, Panpan Achmad, Ir.2000. “ Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Kota Di Indonesia. Berdasarkan Data Susenas 1998”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-30, No.3, 2000. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Fadjri, Panpan Achmad. 2006. “ Peran Penting Proyeksi Penduduk untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Tingkat Kabupaten”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-36, No.4, 2006. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.

- Harmadi, Sonny Harry B., Nuruly, Shaqita. 2006. “ Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kesejahteraan Manusia dan Kaitannya dengan PDRB pada 26 Propinsi di Indonesia”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-36, No. 4, 2006. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Harmadi, Sonny Harry B. 2007. “ Pengangguran, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-37, No. 3, 2007. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Hasbullah, Jousairi. 2007. ” Perspektif Data Kemiskinan BPS ”. Dalam Media Indonesia, 9-Juli-2007
- Lesmana, Teddy. 2007. ”Aset dan Kemiskinan”. Dalam Republika, 9-Juli-2007.
- Manning, Chris.1992. *Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja Di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Muliakusuma, Sutarsih. 2000. “ Perkawinan Dan Perceraian Dalam Kaitannya Dengan Perbedaan Umur Suami Istri ”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-30, No.2, 2000. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Murni, Sylviana. 2002. “ Kebijakan Kependudukan Pada Era Otonomi Daerah Di Provinsi DKI Jakarta “. Dalam Warta Demografi Tahun ke-32, No.4,2002. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Nasution, Ahmad Riswan. 2007. ” Statistik Kemiskinan, BPS, dan Otonomi Daerah ”. Dalam Media Indonesia, 11-Juli-2007.
- Nazara, Suahasil. 2007. “ Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*) bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan.” Dalam Warta Demografi Tahun ke-37, No.3, 2007. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Nurdin, Harto. 2000. “ Mobilitas Penduduk Menjadi Trend Masalah Kependudukan Di Masa Depan.” Dalam Warta Demografi Tahun ke-29, No.1, 2000. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Prihastuti, Dewi, SE., Msi. 2001. “ Sebaran Penduduk Lansia Di Indonesia/ Saat ini dan Masa Depan Kajian Perspektif Demografi Multiregional “. Dalam warta Demografi Tahun ke- 31, No.4, 2001. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.

- Prihastuti, Dewi. 2007. “ Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan untuk Menyongsong Bonus Demografi “. Dalam Warta Demografi Tahun ke- 37, No.1, 2007. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Priyono, Edi. 1999. “ Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Dimensi Makro Dan Mikro”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-29, No.3, 2000. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- R.Siregar, Sutji. 1999. “ Implikasi Dinamika Penduduk Indonesia Sekarang Dan Yang Akan Datang Dalam Bidang Kesehatan”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-29, No.4, 2000. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Ritonga, Razali. 2006. ”Indeks Pembangunan Manusia”. Dalam Kompas, 20-Desember-2006.
- Safiyati. 2002. “ Parameter Perumahan”. Dalam Varia Statistik No.5 Tahun XX April-Oktober 2002. Jakarta : Humas BPS.
- Salahudin, Andi. 2007. ”Mengampanyekan Pengentasan Kemiskinan”. Dalam Republika, 11-Juli- 2007.
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Saputro, Edy Purwo. 2007. ”Pendataan dan Komitmen Pembangunan”. Dalam Republika, 7-Juli- 2007.
- Simanjuntak, Payaman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia/ Edisi 2001*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Soeprobo, Tara B., Tata Tachman. 2002. “ Jaminan Kebutuhan Dasar Penduduk Indonesia”. Dalam Warta Demografi Tahun ke-32, No. 2 & 3, 2002. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Sumarjatiarjoso. 2005. “ Sumbangan Program Keluarga Berencana dalam Mencapai Sasaran MDGs “. Dalam Warta Demografi Tahun ke-32, No.4, 2002. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.
- Surapaty, Surya Chandra, MPH, PHD, Prof., dr., dkk. 2002. “ Upaya Pengendalian Kualitas Penduduk Di Era Otonomi Daerah “. Dalam Warta Demografi Tahun ke-35, No.2, 2005. Jakarta : Lembaga Demografi FE-UI.

- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan dan Widyanti. 2000. Indikator - Indikator Makroekonomi/Edisi kedua. Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1999. “ Urbanisasi Dan Pengembangan Kota Di Indonesia”. Dalam Populasi Volume 11,No.1, 2000. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Wasisto, Broto. 2003. “ Sumber Daya Manusia dan Kondisi Kesehatan Penduduk Masa Depan di Indonesia “. Dalam Warta Demografi Tahun 33, No.1, 2003. Jakarta : Lembaga Demografi FE- UI.
- Widaningrum, Ambar. 2003. “ Utilisasi Pelayanan Kesehatan : Problem Antara Pemerataan dan Efisiensi (Studi di Wilayah Pedesaan Kabupaten Purworejo) “. Dalam Populasi Volume 14 Nomor 1 Tahun 2003. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

<https://imagekeokab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NAGEKEO**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagekeo
Mbay-Flores-NTT 86472
<https://nagekeokab.bps.go.id>